

MEMBANGUN OPTIMISME USAI PEMILU



EDUKASI KONSUMEN

SIKAPIUANGMU.OJK.GO.ID



P2P Lending
**STRATEGI
LEBIH KETAT
UNTUK
MITIGASI
RISIKO**



TIPS MEMINJAM DI FINTECH LENDING



Pinjam di Perusahaan Terdaftar/Berizin di OJK



Pinjam sesuai Kebutuhan dan Kemampuan



Lunasi Cicilan Tepat Waktu



Ketahui Bunga dan Denda Pinjaman Sebelum Meminjam

CEK KE **KONTAK OJK 157**

www.ojk.go.id



MENGAWASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi atau *financial technology (fintech)* harus diakui sangat membantu upaya memperdalam literasi keuangan di Indonesia.

Perkembangan internet dan kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau layanan yang ditawarkan, membuat aplikasi keuangan berbasis teknologi informasi ini semakin diminati masyarakat. Satu sisi, pengembang atau developer yang berkecimpung di industri *fintech* pun semakin beragam.

Mencermati perkembangan keuangan berbasis IT itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentu berupaya agar layanan yang diberikan kepada publik tetap memenuhi prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan gejolak nantinya.

Upaya penguatan terhadap pengawasan layanan keuangan berbasis IT terus dilakukan supaya penyelenggara jasa keuangan dan masyarakat dapat terjamin dari sisi layanan dan perlindungan dalam mengakses jasa keuangan.

Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, OJK

pun meresmikan aplikasi OJK-Box atau OBOX sebagai upaya penguatan pengawasan sektor jasa keuangan berbasis TI yang dimulai penerapannya di sektor perbankan.

OBOX menjadi langkah awal untuk pengembangan sistem pengawasan di industri keuangan dengan mengoptimalkan teknologi informasi. Sistem layanan pengawasan berbasis teknologi itu juga tengah berkembang di dunia keuangan global.

Penguatan pengawasan berbasis TI sejalan dengan tren perkembangan inovasi produk dan layanan keuangan di industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan membutuhkan pola pengawasan yang lebih responsif untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang dapat mengganggu kesehatan industri jasa keuangan.

Adanya aplikasi OBOX diharapkan bahwa setiap potensi risiko di industri keuangan dalam negeri, nantinya dapat dilakukan sejak dini, baik deteksi awalnya, maupun cara melakukan antisipasi.

Selain deteksi dini, pengawasan berbasis IT dengan aplikasi OBOX diharapkan dapat lebih optimal

karena data dan informasi yang tersedia lebih lengkap.

Ke depan, OJK akan menitikberatkan pada konfirmasi hasil analisis terhadap data dan informasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Aplikasi OBOX juga akan menguntungkan industri jasa keuangan karena akan mengurangi beban dan waktu pelayanan pemeriksaan *on-site*, percepatan respons hasil pemeriksaan, percepatan pengembangan peringatan dini serta rencana aksi dan membangun kepercayaan antara pengawas dan industri jasa keuangan.

Dengan adanya sistem aplikasi OBOX tersebut, harapannya industri jasa keuangan di Tanah Air bisa lebih leluasa dalam mengembangkan layanan yang sejalan dengan tren di dunia teknologi.

Harapannya, sistem itu tidak menghalangi industri keuangan berkreasi. Industri keuangan tetap harus bisa optimal dalam meningkatkan pasar keuangan dalam negeri yang masih cukup terbuka lebar.

Dengan demikian, kontribusi industri keuangan bagi perekonomian nasional semakin nyata. ●



Dewan Pelindung: Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisiner OJK)

Dewan Penasehat: Tirta Segara (Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen),

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Sarjito (Deputi Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)

Redaktur Ahli: Sondang Martha Samosir (Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan), Rudi Saleh (Kepala Departemen Perlindungan Konsumen), Horas V.M. Tarihoran (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), Rela Ginting (Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK), Agus Fajri Zam (Direktur Pelayanan Konsumen), Bernard Widjaja (Direktur Market Conduct)

Redaktur: Greta Joice Siahaan (Deputi Direktur Literasi dan Informasi)

Redaksi: Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

Alamat Redaksi: Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK Menara Radius Prawiro Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350

Telepon: (021) 29600000 Faksimili: (021) 3866032 Website: www.ojk.go.id.

Majalah Edukasi Konsumen dapat diunduh pada minisite OJK: sikapiuangmu.ojk.go.id

Daftar Isi

Edisi Juni 2019



SOROTAN UTAMA

P2P Lending

Strategi Lebih Ketat Untuk Mitigasi Risiko

Strategi tersebut termasuk transparansi dan penerapan *credit scoring*. Hal itu guna menghindari kenaikan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* serta menjaga reputasi industri *fintech lending* yang sedang berkembang.

- 3 **SALAM REDAKSI**
Mengawasi Berbasis Teknologi Informasi
- 9 **PERSPEKTIF**
Peran Regulasi, Lisensi, dan Supervisi Industri Baru
- 11 **FOKUS PASAR MODAL**
Membangun Optimisme Usai Pemilu
- 13 **FOKUS PERBANKAN**
Likuiditas Mengetat, Bank Tahan Kredit
- 15 **INFO PERBANKAN**
Standar Baru, Akuntabilitas Lebih Terjaga
- 16 **TINJAUAN REGULASI**
Ganti Rugi untuk Investor
- 18 **BISNIS PEMULA**
Investasi untuk Generasi Milenial
- 22 **WASPADA INVESTASI**
Bersama Memerangi Investasi Ilegal
- 24 **TELAAH PRODUK**
Mudahnya Menjadi Investor Pasar Modal
- 26 **INFO PASAR MODAL**
Mewujudkan Target 75 Emiten Baru
- 28 **FOKUS GLOBAL**
Komitmen OJK Jalankan Pembiayaan Berkelanjutan Untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
- 30 **ANGKA BICARA**
Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan
- 33 **INFO PEMBIAYAAN**
Makin Optimistis Setelah *Asset Registry* Meluncur
- 35 **TOKOH**
Menyiasati Pengetatan Likuiditas
- 37 **INFO IKNB**
Konsorsium Mulai Lakukan *Piloting*

KONSUMEN BICARA 20

Mewujudkan Pinjaman Online yang Profesional



31
INSPIRASI

Karman Pamurahardjo
Presiden Direktur Profindo
Sekuritas Indonesia

Terus Bekerja Keras, Tetap Optimis

- 39 **SERI PENGETAHUAN UMUM**
 - Tip Berinvestasi di *Fintech Lending*
 - Menjaga Kualitas Kredit Lewat Data
 - Mengenal Jenis Indeks Saham
- 42 **ARTIKEL**
 - Tips Meminjam di *Fintech Lending* Sesuai Kebutuhan & Kemampuan Membayar
- 44 **KABAR OTORITAS**
 - Bandung Edu Fin Run 2019
 - OJK Dorong Inklusi Keuangan di Hari SimPel
 - Generasi Muda Pelajari Masalah Keuangan
 - OJK Gencarkan Edukasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Investor Saham Pemula





P2P Lending

STRATEGI LEBIH KETAT UNTUK MITIGASI RISIKO

Strategi tersebut termasuk transparansi dan penerapan *credit scoring*. Hal itu guna menghindari kenaikan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* serta menjaga reputasi industri *fintech lending* yang sedang berkembang.

SOROTAN UTAMA

Jumlah Akumulasi Rekening <i>Lender</i> (Satuan Entitas)	Maret 2019	Desember 2018	
a. Jawa (<i>Lender</i> dari Jawa)	205.400	155.230	32,32%
b. Luar Jawa (<i>Lender</i> dari Luar Jawa)	64.930	50.281	29,13%
c. Luar Negeri (<i>Lender</i> dari Luar Negeri)	2.218	1.996	11,12%
d. Total	272.548	207.507	31,34%
Jumlah Akumulasi Rekening <i>Borrower</i> (Satuan Entitas)			
a. Jawa	5.757.225	3.664.645	57,10%
b. Luar Jawa	1.204.768	694.803	73,40%
c. Total	6.961.993	4.359.448	59,70%
Jumlah Akumulasi Transaksi <i>Lender</i> (Satuan Akun)			
a. Jawa	11.211.477	5.744.372	95,17%
b. Luar Jawa	714.342	499.159	43,11%
c. Luar Negeri	3.742.093	2.547.785	46,88%
d. Total	15.667.912	8.791.316	78,22%

Sebagaimana terekam dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kuartal I/2019 diwarnai dengan lonjakan *NPL* tekfin *lending*. Rasio *NPL* tekfin *lending* melompat menjadi 3,18% pada Februari 2019, dari 'hanya' 1,68% pada Januari 2019 dan 1,5% pada Desember 2018.

NPL fintech lending pada Maret 2019 memang kembali turun, yakni menjadi 2,62%. Namun demikian, angka itu belum kembali ke level di bawah 2% seperti periode-periode sebelumnya.

Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Nurhaida mengatakan, *P2P lending* merupakan segmen *fintech* yang diawasi secara prudential oleh otoritas. Oleh karena itu, OJK meningkatkan standar transparansi yang harus dipenuhi oleh *P2P lending*. "Apa yang bisa dilakukan OJK? Harus ada upaya untuk membuat pemilik pinjaman merasa nyaman bertransaksi dengan si penerima pinjaman.

Salah satunya dengan mewajibkan adanya transparansi. Dengan adanya transparansi, peminjam dan pemberi pinjaman akan mengetahui risikonya masing-masing," katanya, Senin (20/5/2019).

Direktur Perizinan Pengaturan dan Pengawasan *Fintech* OJK Hendrikus Passagi mencontohkan, salah satu bentuk transparansi tersebut, yakni mencantumkan informasi Tingkat Keberhasilan (TKB) pembayaran pinjaman.

Sebagai tahap *pertama*, *P2P lending* harus memasang TKB di halaman depan situs resminya. Kewajiban ini sudah mulai diterapkan pada April 2019.

Kedua, *P2P lending* juga harus mencantumkan *disclaimer* yang menginformasikan bahwa *platform* tersebut adalah layanan pinjam meminjam yang berisiko. Bagi yang belum berpengalaman, disarankan untuk tidak menggunakan. "Ketika TKB-nya turun ke level tertentu, nanti tidak ada yang mau pakai,

kegiatannya akan menurun, maka kinerjanya akan membaik," ujarnya, Kamis (9/5).

Hal ini, kata Hendrikus juga dilakukan untuk membedakan konsep *NPL* pada penyelenggara *P2P lending* dengan lembaga jasa keuangan konvensional lainnya seperti perbankan ataupun *multifinance*. Perhitungan *NPL* pada *fintech lending* dilakukan berdasarkan perbandingan nilai kredit macet di atas 90 hari.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Harian Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah. Menurutnya, terminologi *NPL* identik dengan pencadangan yang dapat langsung berdampak pada kerugian perusahaan.



Jumlah Akumulasi Transaksi Borrower (Satuan Akun)			
a. Jawa	19.133.394	12.169.789	57,22%
b. Luar Jawa	3.591.915	2.161.652	66,17%
c. Total	22.725.309	14.331.441	58,57%
Akumulasi Jumlah Pinjaman (Rp Triliun)			
a. Jawa	Rp 28,55	19,61	45,55%
b. Luar Jawa	Rp 4,64	3,04	52,41%
d. Total	Rp33,20	22,66	46,48%
Rata-Rata Tingkat Keberhasilan dan Tingkat Wanprestasi			
Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB90)	97,38%	98,55%	-1,19%
Tingkat Wanprestasi di atas 90 hari (TWP90)	2,62%	1,45%	80,31%
Karakteristik Pinjaman			
	Maret 2019	Desember 2018	
Nilai pinjaman terendah (Rp)	Rp 1.320	1.590	-16,98%
Rata-rata nilai pinjaman terendah (Rp)	Rp 9.229.948	17.755.363	-48,02%
Rata-rata nilai pinjaman yang disalurkan (Rp)	Rp 82.194.152	65.811.668	24,89%

Sumber: OJK.

“Namun, *P2P lending* tidak demikian. *NPL* tidak berpengaruh terhadap kinerja atau profitabilitas *platform* karena bisnisnya *off balance sheet*,” jelasnya.

Adapun yang terpengaruh adalah minat pihak pendana atau *lender*. Jika minat *lender* semakin berkurang, akses *fintech* terhadap sumber dana juga kian sulit. Untuk itu, informasi TKB ini sangat bermanfaat bagi *lender* terkait *net return* yang didapat.

Dia memisalkan, suatu platform menawarkan *return* 20% dengan TKB 95%, artinya terdapat 5% kegagalan. Dengan demikian, *net return* yang diterima *lender* kurang lebih sekitar 15%. “*Lender* tinggal memutuskan *net* segitu mau atau tidak. Namun jika dibandingkan dengan deposito jauh tetap lebih tinggi *kan*,” ujarnya.

Kuseryansyah mengungkapkan, asosiasi belum menentukan standar nilai TKB yang harus dipenuhi *P2P lending*. Hal itu karena setiap penyelenggara menawarkan tingkat

return yang berbeda-beda dengan profil risiko yang juga berbeda.

Pelaku Usaha

Head of Marketing PT Finacel Teknologi Indonesia (Kredivo) Indina Andamari menuturkan bahwa pihaknya melakukan strategi lebih ketat dalam menerapkan *credit scoring* sebagai upaya memitigasi risiko sekaligus menjaga *NPL*. Hal itu seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna dan pencairan pinjaman bulanan yang terjadi pada *platform* tersebut.

Hingga saat ini, jumlah transaksi yang diproses oleh Kredivo dapat mencapai 5.000 per hari. Dia optimistis jumlah ini bakal tumbuh dua kali lipat pada tiga bulan mendatang.

Untuk itu, Kredivo mengandalkan *big data* yang dimiliki guna menentukan kemampuan bayar setiap aplikasi pinjaman yang masuk. Di sisi lain, Kredivo mengenakan suku bunga paling rendah, yaitu 0%, untuk pembayaran tepat waktu.

“Justru karena bunga kami rendah, kami harus konsisten menjaga *NPL*. Caranya mulai dari *credit scoring system* harus akurat, yaitu memilah calon konsumen mana yang akan *default* atau tidak,” katanya.

Menurutnya, faktor lupa masih menjadi latar belakang keterlambatan pembayaran oleh konsumen. “Bukan karena tidak mampu membayar,” katanya.

Perseroan sendiri menerapkan alur penagihan yang dinilai efektif, yakni dimulai dari notifikasi otomatis berupa telepon hingga kunjungan secara langsung.

Penagihan dilakukan sesuai dengan sistem yang dapat menentukan prioritas konsumen yang ditagih.

Meskipun bermain di lini *unsecured loan* atau pembiayaan konsumtif, Kredivo optimistis dapat menjaga *NPL* di level sekitar 3%.

Indiana mengaku tidak khawatir dengan risiko kenaikan kredit macet

SOROTAN UTAMA

karena sistem *credit scoring*, *fraud detection* dan proses *collection* tetap berjalan seperti biasa. “Antisipasinya paling kalau sampai ada tanda perubahan drastis tiba-tiba, maka harus cepat diinspeksi. Tapi biasanya aman kok. *Overall* pertumbuhan kami juga cukup stabil. Jadi setelah Lebaran pun tetap tumbuh,” jelasnya.

Sementara itu, Christopher Gultom, *Chief Credit Officer & Co-Founder* PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) mengatakan, pihaknya mampu menjaga *NPL* di level 0,37% pada Maret 2019 dengan melakukan *filtering* yang cukup ketat. Bukti dari seleksi ketat itu yakni tingkat penerimaan aplikasi pinjaman yang tergolong rendah, yakni hanya sekitar 1:5.

“Angka 1:5 adalah angkanya yang nyaman bagi kami. Kalau kami meningkatkan tingkat penerimaan, *NPL* bisa naik. Dari kami untuk *filtering* awal cukup ketat dan cukup selektif,” katanya.

Perseroan masih menerapkan prinsip 5C seperti yang diterapkan oleh perbankan untuk memastikan kemampuan bayar nasabah. Selain itu, Akseleran masih menerapkan syarat agunan pada setiap pinjamannya. Kendati tingkat penerimaannya rendah, dia meyakini pertumbuhan pembiayaan Akseleran tidak akan terganggu.

Hingga 15 April 2019, pembiayaan yang telah disalurkan oleh Akseleran mencapai Rp393 miliar. Sekitar 55% sudah dilunasi karena sudah jatuh tempo dan 45% sisanya merupakan *outstanding*. Akseleran fokus menggarap pasar UMKM. Beberapa produk yang ditawarkan *platform* ini, yakni pembiayaan tagihan (*invoice financing*), pembiayaan untuk *merchant online*, *inventory financing*, dan pembiayaan piutang.

Adapun, Direktur Utama PT Kredit Pintar Indonesia Wisely Reinharda Wijaya mengatakan sejauh ini, tingkat keberhasilan (TKB)



Selain *playstore*, *platform* media sosial, seperti *instagram* juga menjadi tempat perkebang biakan akun pinjaman *online* ilegal. Untuk itu, Satgas Waspada Investasi mengingatkan masyarakat untuk waspada dan hati-hati terhadap tawaran *fintech* yang tidak terdaftar di OJK.

pengembalian dana lender pada hari ke-90 Kredit Pintar mencapai 100%.

Adapun sebagai langkah antisipasi, dia telah menyiapkan menggandeng asuransi kredit yang menjamin pengembalian dana *lender* apabila ada *borrower* yang tidak membayar pinjamannya.

Masyarakat Waspada

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mencatat ada banyak sekali temuan *fintech* ilegal di negara ini. Hanya dari aplikasi *Google Playstore*, banyak sekali ditemukan nama-nama *platform* yang tidak memiliki kejelasan identitas badan usaha.

Selain *playstore*, *platform* media sosial, seperti *instagram* juga menjadi tempat perkebang biakan akun pinjaman *online* ilegal.

Untuk itu, Satgas Waspada Investasi mengingatkan masyarakat untuk waspada dan hati-hati terhadap tawaran *fintech* yang tidak terdaftar di OJK.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari *fintech lending*, Tongam mengatakan, *pertama-tama* masyarakat harus meminjam pada entitas *fintech* yang sudah terdaftar di OJK.

Kedua, pahami syarat, risiko dan kewajibannya. *Ketiga*, masyarakat

diminta meminjam sesuai dengan kemampuan bayar.

“Saat ini kami masih monitor perkembangannya. Kami menduga masih ada muncul penawaran *fintech* ilegal karena mudahnya membuat aplikasi dan *web* saat ini. Namun demikian, kami tetap monitor dan melakukan pemblokiran secara dini melalui Kemenkominfo,” ujarnya, (7/5/2019).

Dalam video *Instagram* OJK, Anggota Dewan Komisioner OJK Tirta Segara memberikan sejumlah tips bagaimana menggunakan *fintech lending* secara tepat. *Pertama*, ujarnya, jangan meminjam uang jika tidak mendesak.

Kedua, bayarlah pinjaman sampai lunas, karena itu menjadi kewajiban peminjam. *Ketiga*, bayarlah pinjaman tepat waktu dengan jumlah yang sudah ditentukan, agar terhindar dari bunga.

Keempat, pinjamlah pada *platform fintech* yang terdaftar dan berizin di OJK. Untuk mengetahui legalitas tekfin yang hendak dipilih, masyarakat dapat berkonsultasi dengan OJK melalui Kontak OJK ke 157. “Memang akhir-akhir ini banyak tawaran untuk meminjam uang melalui *online*. Sepertinya memang mudah dan menarik. Tetapi saya berpesan, harus berhati-hati,” pesan Tirta. ●

Hendrikus Passagi

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan *Fintech* OJK

Peran Regulasi, Lisensi, dan Supervisi Industri Baru

Kurang dari 3 tahun sejak kemunculannya, industri teknologi finansial atau *financial technology (fintech)*, telah semakin menunjukkan kontribusinya bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Hal itu terlihat dari semakin berkembangnya jenis-jenis *fintech*, jumlah pelaku usaha yang terus bertambah, hingga jumlah nasabah yang terus bertumbuh.

Sampai dengan Mei 2019, telah tercatat 258 *fintech* di Indonesia, yang terdiri dari 113 *Peer to Peer (P2P) lending* terdaftar, 64 *fintech* pembayaran (*payment*), 21 *fintech market provisioning*, 16 *fintech enabler*, 14 *fintech wealth management*, 8 *insurtech*, 6 *equity crowdfunding*, dan 16 *fintech* lainnya.

Khusus *P2P lending*, terdapat 108 entitas yang terdaftar dan 5 entitas berizin di OJK. Total terdapat 272.548 pemberi pinjaman (*lender*) dan 6,96 juta peminjam (*borrower*), dengan

Rp33,2 triliun jumlah pembiayaan yang disalurkan (per Maret 2019).

Perkembangan itu tidak lepas dari sepak terjang Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan *Fintech* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi. Sejak menjabat pada Agustus 2017, mantan *Senior Research Executive* OJK inipun berkuat dengan regulasi, lisensi, juga supervisi *fintech lending* yang saat itu baru saja muncul.

Setiap bulan pihaknya terus menerima gelombang pengajuan lisensi dari ratusan entitas *fintech lending* yang ada di Indonesia. Satu per satu pengajuan itu diverifikasi, sehingga otoritas yakin bahwa *fintech* tersebut sudah layak mendapatkan lisensi terdaftar. Sebab, bagi otoritas, ekosistem *fintech lending* diharapkan dapat tumbuh kuat sekaligus sehat.

Untuk itu, Hendrikus mendorong *fintech lending* untuk bekerja sama dengan pelaku industri lainnya dari sektor manapun, demi menopang kemajuan bisnis. Regulator, ujarnya, memberikan ruang luas bagi *fintech lending* untuk membuka peluang ekspansi, selama dilakukan secara sehat dan dengan entitas yang sama-sama legal.

Perkembangan bisnis sejauh ini juga menggambarkan bahwa kepercayaan publik semakin meningkat terhadap kehadiran

fintech P2P lending sebagai alternatif pendanaan.

Menurut Hendrikus, kehadiran sekitar 106 penyelenggara *P2P lending* telah memberi ruang pilihan yang luas bagi para pelaku UMKM untuk dapat memilih *platform* dengan berbagai bisnis model, seperti di sektor pertanian, kelautan, peternakan, kerajinan, dan perdagangan mikro. Untuk pinjaman UMKM, pendanaan dapat dimulai dari Rp500.000 – Rp2 miliar.

Selain faktor-faktor tersebut, pertumbuhan pendanaan di luar pulau Jawa juga semakin membaik karena peran literasi dan sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak, termasuk pemberitaan positif dari berbagai media. “Terlebih, para penyelenggara telah mampu membangun ekosistem bersama dengan pelaku ekonomi digital lainnya, sehingga layanan dapat berlangsung semakin mudah, cepat, nyaman, dan aman,” katanya.

OJK juga terus memberikan perhatian khusus terhadap proses bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang telah mendapatkan lisensi terdaftar maupun berizin. Dan untuk melakukan pengawasan tersebut, pihaknya tidak segan bekerjasama dengan asosiasi yang menaungi industri *fintech lending*.



Seperti baru-baru ini, ketika Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menemukan ada dua anggotanya yang melanggar ketentuan biaya. Sebagai informasi, AFPI merupakan mitra OJK untuk menjaga keberlangsungan *fintech lending*.

Setiap *fintech lending* yang berlisensi harus menjadi anggota AFPI. Adapun, kedua *platform* tersebut menerapkan biaya lebih dari ketentuan yang ditetapkan yakni sebesar 0,8% per hari.

Angka 0,8% tersebut merupakan besaran maksimal yang terdiri dari biaya bunga, biaya transfer antar bank, biaya verifikasi, denda, dan lainnya, yang diperoleh berdasarkan hasil kesepakatan anggota AFPI. “Sudah ada dua yang mendapat peringatan tertulis keras dari AFPI. Artinya tinggal selangkah kalau terbukti melakukan kesalahan lagi maka akan dicabut tanda legalnya [oleh OJK],” ujar Hendrikus, Kamis (9/5).

Terkait aturan besaran biaya pinjaman, Hendrikus menegaskan, regulator tidak bisa mendikte besaran bunga. Besaran bunga berdasarkan kesepakatan antara *lender* dan *borrower*. AFPI bebas menentukan sikap terhadap anggotanya, sementara OJK tidak boleh mengintervensi.

Dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sendiri, telah menjelaskan urutan sanksi yang dapat dikenakan oleh penyelenggara *P2P lending* yang melanggar. Sanksi tersebut berturut-turut adalah peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, sampai pencabutan izin. “Dalam industri yang baru setiap orang bisa buat salah. Tinggal diukur apakah kesalahan ini disengaja atau tidak,” jelasnya.

Selain faktor pelanggaran yang bersifat operasional bisnis, faktor kesehatan pinjaman industri juga

turut menjadi perhatian Hendrikus.

Seperti belum lama ini, ketika rasio pinjaman bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) industri meningkat signifikan. Sebagaimana terlihat melalui data OJK, *NPL fintech lending* sempat menyentuh level 3,18% pada Februari 2019, melonjak dibandingkan periode-periode sebelumnya yang selalu di kisaran 1%. Pada Maret, meskipun terjadi penurunan tipis, *NPL fintech lending* tetap tergolong tinggi di angka 2,62%.

Hendrikus menjelaskan, tren kenaikan *NPL* disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang memicu peningkatan *NPL* di antaranya adalah kenaikan tingkat *outstanding* pembiayaan yang disalurkan *fintech*. Akumulasi pinjaman *fintech* hingga Maret 2019 mencapai Rp33,20 triliun atau naik 46,4% jika dibandingkan pada Desember 2018 (*year to date/ytD*).

“Di *P2P lending*, jumlah pinjaman yang disalurkan meningkat tajam. Sama saja kalau Anda pakai mobil di jalan raya bisa lecet, tetapi kalau tidak mau lecet parkir saja di garasi,” ujarnya.

Faktor kedua, yakni bermunculannya pemain baru. Menurutnya, dengan hadirnya puluhan pemain baru, hal ini memicu kenaikan potensi tingkat kredit macet di *platform fintech lending* lantaran mesin *credit scoring* yang dimiliki belum secerdas pemain lama. Dengan demikian dibutuhkan waktu sehingga mesin tersebut melakukan seleksi yang lebih baik.

Ketiga, kenaikan *NPL* juga didorong oleh jumlah *borrower*

semakin banyak.

Berdasarkan data OJK, jumlah rekening pemberi pinjaman sebanyak 272.548 entitas dan penerima pinjaman 6.961.993 entitas.

Untuk itu, pihaknya terus berkomunikasi dengan pelaku industri. Namun demikian, Hendrikus menilai transparansi jauh lebih penting dari *NPL* yang sering dijadikan *benchmark* dalam industri keuangan konvensional.

“Memahami industri baru wajib diimbangi dengan mindset baru. Dalam transaksi *peer to peer*, transparansi merupakan komponen penting. Seburuk apapun informasinya, publik akan tetap memberi apresiasi sepanjang informasi dibuka setiap saat dan secara lugas. *Welcome to the New World*,” tuturnya.

Ke depan, dapat diperkirakan bahwa *fintech* jasa keuangan di Indonesia akan semakin berkembang pesat, tak hanya *P2P lending*. Kehadiran departemen inovasi keuangan digital di OJK sendiri, mengindikasikan perkembangan *fintech* akan semakin luas.

Di samping *P2P lending*, *fintech* seperti *equity crowdfunding*, *blockchain*, *agregator*, dan *robo adviser* diprediksi bakal semakin berkembang. Maka, dapat dibayangkan peran regulasi, lisensi, dan supervisi yang harus dilakukan oleh OJK pun akan semakin luas. ●



Sejak awal tahun, kondisi pasar modal Indonesia terbilang sangat kondusif meski situasi politik nasional sedikit memanas akibat kampanye Pemilihan Presiden 2019.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengukir level tertingginya pada 6 Februari 2019 yakni pada level 6.547. Tren *bullish* yang konsisten tersebut terbentuk sejak November 2018.

Saat itu pelaku pasar memperkirakan tekanan yang berasal dari ketidakpastian global baik itu perang dagang antara AS dan China maupun kebijakan suku bunga The Fed, akan relatif berkurang dibandingkan dengan 2018.

Faktor kontestasi Pemilu 2019 pun dinilai hanya akan berdampak minor bagi perkembangan pasar modal, terlebih bila proses penyelenggaraannya berjalan lancar dan damai. *Wait and see* diperkirakan terjadi 2-3 bulan jelang pelaksanaan pemilu dan setelah itu investor pun diperkirakan kembali agresif.

Tak heran jika sejumlah *fund manager* memproyeksikan IHSG pada tahun ini bisa menembus level 7.000.

Namun demikian, laju IHSG berbalik *bearish* pasca pencoblosan pemilu. Tepatnya, sehari setelah pencoblosan yakni 18 April 2019, IHSG terus bergerak di zona merah hingga menembus level 5.826 pada Jumat (17/05/2019). Koreksi ini sebenarnya merupakan koreksi yang normal secara teknikal setelah *bullish* dalam kurun hamper lima bulan.

Benar saja, laju penurunan indeks tersebut baru berbalik arah dengan mengambil momentum pengumuman rekapitulasi hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan kemenangan pasangan petahana yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pada Selasa (22/05/2019) IHSG ditransaksikan menguat 0,75% ke level 5.951,37.

Membangun Optimisme

Usai Pemilu



Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Inarno mengatakan, IHSG mulai *rebound* setelah berada di zona merah cukup dalam. “Jadi kembali lagi, menurut saya yang kemarin-kemarin itu agak *overshoot*. Sekarang sudah mulai bagus untuk *collect* lagi. Kita harapkan pengumuman tidak ada apa-apa,” jelasnya, Selasa (21/05/2019).

Menurutnya, investor asing yang sebelumnya banyak keluar, kini sudah mulai masuk lagi ke pasar modal dalam negeri.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo mengatakan,

pengumuman hasil Pemilu 2019 bisa menjadi titik balik bagi pergerakan IHSG ke depan. Menurutnya, pelemahan indeks sebelumnya dipicu oleh beberapa faktor yakni *pertama*, hasil kinerja emiten selama kuartal I/2019 yang lebih rendah dari perkiraan analis telah membuat perkiraan pendapatan emiten di *down grade*.

Kedua, rilis data makro ekonomi pada pekan lalu yang kurang memuaskan di mana laju pertumbuhan ekonomi kuartal I/2019 hanya tumbuh 5,07% atau di bawah ekspektasi pasar yakni 5,1%-5,2%. *Ketiga*, situasi politik nasional

yang dihantui kekhawatiran bahwa pihak yang kalah akan menolak hasil Pemilu 2019.

Sementara itu, dari sisi eksternal, kembali memanasnya perang dagang antara AS dan China juga memengaruhi keputusan investasi investor di pasar saham. Kondisi tersebut tercermin dari *capital outflow* yang terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurutnya, *capital outflow* yang terjadi saat ini masih dalam taraf yang normal sehingga bisa ditolelir.

Di tengah situasi seperti ini, Laksono meminta investor untuk tidak panik dan tetap rasional. “Jadi menurut saya bisnis tetap seperti biasa, tidak ada alasan untuk panik saat ini,” ujarnya.

Portfolio Manager Equity PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Andrian Tanuwijaya justru melihat

volatilitas pasar saat ini sebagai peluang yang bisa dimanfaatkan oleh investor untuk mengambil posisi investasi. Menurutnya, gejala yang terjadi juga bersifat sementara.

“Sejauh ini kami memandang fundamental pasar masih tetap sehat. Kinerja emiten kami ekspektasi tetap tumbuh positif sepanjang tahun ini dan kondisi makro ekonomi Indonesia juga tetap baik,” jelasnya.

Dia menuturkan, terdapat beberapa faktor yang dapat menopang pasar modal ke depannya. *Pertama*, proses Pemilu 2019 yang berjalan dengan aman telah menghilangkan kekhawatiran politik yang sempat membayangi pasar.

Kedua, arah kebijakan Bank Indonesia yang berpotensi melakukan pelonggaran suku bunga acuan menjadi sentimen positif bagi pasar dan menjadi katalis positif bagi pasar keuangan Tanah Air.

“Faktor-faktor tersebut ditambah basis fundamental ekonomi domestik yang sehat menjadi daya tarik pasar saham Indonesia dan menarik bagi investor asing,” jelas Andrian.

Dengan kondisi internal yang baik, menurutnya, risiko terbesar bagi pasar modal Tanah Air adalah berasal dari faktor eksternal yakni eskalasi perang dagang AS dan China.

Analisis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan juga menilai bahwa pergerakan IHSG ke depan akan lebih banyak dibayang-bayangi oleh sentimen global ketimbang sentimen internal.

Direktur Utama Danareksa *Investment Management* Marsangap P. Tamba mengatakan, gairah investasi di Indonesia seharusnya kembali meningkat usai Pemilu 2019. Pasalnya, selama ini hajatan pemilu menjadi salah satu faktor yang membuat investor memilih *wait and see*.

Dari sisi fundamental makro ekonomi, jelasnya, Indonesia saat ini masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di dunia.

“Pasca pemilu, ekonomi selalu naik, investasi selalu meningkat, yang kemarin tahan akan merealisasikan investasinya. Pengalaman setiap pemilu selalu begitu. Pasar domestik kita punya daya tahan terhadap tekanan global,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Optimisme bahwa ekonomi akan berjalan lebih baik usai pemilu juga disampaikan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani. Menurutnya, pelaksanaan pemilu yang relatif baik dan aman menjadi momentum yang tepat bagi investor asing untuk kembali menginvestasikan dananya baik di pasar saham maupun obligasi.

Jika hari pencoblosan menjadi momentum pasar untuk melakukan koreksi, maka pengumuman hasil Pemilu 2019 diharapkan menjadi momentum bagi pasar untuk bangkit lagi. ●



Likuiditas Mengetat, Bank Tahan Kredit

Pengetatan likuiditas perbankan mulai terjadi sejak Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan pada April 2018. Sepanjang tahun lalu, sebanyak enam kali BI 7 – Day Reverse Repo Rate naik. Dari mulai 4,25% menjadi 6,00%, jadi ada kenaikan 175 basis poin pada tahun lalu.

Sepanjang tahun berjalan 2019, suku bunga acuan ditahan pada level 6,00%. Namun, efek ekor jas dari kenaikan suku bunga acuan itu terasa sampai tahun ini. Bahkan, semakin menjadi karena bank-bank saling mengamankan dan mempertahankan likuiditas dengan menaikkan suku bunga simpanan.

Bahkan suku bunga simpanan yang dinaikkan yang tergolong *special rate*. Strategi *special rate* tidak hanya diterapkan bank skala kecil, tetapi juga Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) III dan IV atau bank bermodal besar.

Strategi ini juga diikuti oleh bank skala menengah dan kecil. *Special rate* biasanya diberikan bagi depositan khusus dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., misalnya, telah menerapkan strategi itu pada awal tahun ini. Direktur Keuangan dan Treasury Bank Tabungan Negara (BTN) Iman Nugroho Soeko mengakui, tingkat suku bunga yang diberikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“BTN untuk *special rate* ikut *guidance*-nya OJK untuk bank BUKU III yaitu BI Rate 12 bulan plus 100 basis poin [bps],” katanya saat dihubungi, Selasa (7/5/2019).

OJK mengatur suku bunga spesial BUKU III dan IV masing-masing sebesar 100 bps dan 75 bps di atas BI Rate. Adapun, suku bunga operasi moneter tenor 12 bulan BI pada saat ini sebesar 6,77% per 6 Mei 2019.

Iman memperkirakan, perang suku bunga masih berlanjut karena belum ada tanda-tanda pelonggaran likuiditas di pasar. Apalagi, jika bank-bank besar turut menaikkan suku bunga dana pihak ketiga (DPK).

Hal itu tentu akan berdampak pada peningkatan biaya dana dan menekan margin keuntungan bank, seperti yang dialami BTN pada kuartal I/2019.

Selain BTN, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. juga mengimplementasikan strategi serupa. Direktur Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan, pada tahun lalu pihaknya tidak menawarkan *special rate*.

Menurutnya, kenaikan bunga deposito itu dilakukan untuk mengikuti perkembangan di pasar,





Jumlah total aset likuid perbankan yang mencapai sebesar Rp1.250 triliun pada akhir Maret 2019, dinilai berada pada level yang cukup tinggi untuk mendukung pertumbuhan kredit ke depan.

walaupun efeknya membuat biaya dana jadi terkerek.

Dia menjelaskan, hampir semua bank menaikkan biaya dana akibat peningkatan suku bunga dan persaingan perebutan dana sejak tahun lalu.

“Likuiditas ketat, terpaksa kami harus masuk dalam *special rate* deposito dan sebagian suku bunga DPK valas terpaksa kami adjust,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Samsu Adi Nugroho, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyatakan bahwa suku bunga deposito spesial yang diberikan oleh perbankan masih bergerak di level yang wajar.

LPS mencatat hingga tanggal 3 Mei 2019, rata-rata level suku bunga *special rate* yang diberikan bank berkisar antara 7,26%-7,39%.

“Yang sedikit berbeda saat ini adalah rentang suku bunga yang diberikan antar kelompok buku bank lebih sempit atau dengan kata lain suku bunga BUKU I dan II dan seterusnya relatif sama,” katanya saat dihubungi.

Kredit Melambat

Dampak dari persaingan memperebutkan dana terasa pada penyaluran kredit. Pertumbuhan kredit perbankan melambat dalam 3 bulan terakhir, karena bank tengah fokus menghimpun dana di tengah pengetatan likuiditas.

Pertumbuhan kredit per Maret 2019 tercatat mencapai 11,5% secara *year-on-year (yoy)*, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada Februari 2019 yang mencapai 12,1% *yoy*.

Sebaliknya, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan justru menunjukkan perbaikan. Per Maret 2019, DPK tumbuh 7,2% secara *yoy*. Pada bulan sebelumnya, pertumbuhan DPK tercatat baru mencapai 6,6% *yoy*.

Menurut Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo, penghimpunan dana menunjukkan kinerja yang positif.

“Untuk DPK perbankan meningkat dibandingkan dengan

kuartal sebelumnya,” kata Anto lewat keterangan tertulis, Rabu (24/4/2019).

Sementara itu, profil risiko lembaga jasa perbankan juga dinilai terjaga pada level yang *manageable*. Risiko kredit berada pada level yang rendah, tercermin dari rasio *Non-Performing Loan (NPL)* gross perbankan sebesar 2,51% sedangkan *NPL* net sebesar 1,12%.

Risiko pasar perbankan juga berada pada level yang rendah, dengan rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan sebesar 2,16%.

“Pertumbuhan intermediasi didukung likuiditas perbankan yang terjaga pada level yang memadai, tercermin dari *liquidity coverage ratio* dan rasio alat likuid/*non-core deposit* masing-masing sebesar 201,03% dan 113,18%.”

Jumlah total aset likuid perbankan yang mencapai sebesar Rp1.250 triliun pada akhir Maret 2019, dinilai berada pada level yang cukup tinggi untuk mendukung pertumbuhan kredit ke depan.

Pertumbuhan industri jasa perbankan juga masih didukung oleh permodalan yang kuat. *Capital Adequacy Ratio* industri perbankan meningkat menjadi 23,97% pada Maret 2019.

Anto melanjutkan, OJK akan terus memantau perkembangan di pasar keuangan global dan domestik, serta dampaknya terhadap pertumbuhan intermediasi sektor jasa keuangan nasional.

“OJK juga akan senantiasa memantau potensi risiko yang mungkin timbul untuk tetap menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan. Untuk itu, OJK senantiasa memperkuat koordinasi dengan para *stakeholder* terkait untuk memenuhi prasyarat yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan kinerja intermediasi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.” ●

Penerapan PSAK 71

Standar Baru, Akuntabilitas Lebih Terjaga

PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Sistem akuntansi ini mengadopsi *International Financial Report Standard (IFRS)*. PSAK-IFRS ini diterapkan untuk badan dengan akuntabilitas publik/ umum seperti bank, emiten, asuransi, dan perusahaan pelat merah.

Standar akuntansi ini terus mengalami perkembangan. Terkini, PSAK 71 akan diterapkan menggantikan PSAK 55. Ketentuan terbaru ini akan diimplementasikan pada 1 Januari 2020. Perbankan pun mulai bersiap menerapkan standar baru ini.

Dalam jangka pendek, ada sisi positif dan sisi negatif dalam mengadopsi standar baru ini. Sisi

expected credit loss atau melihat potensi kerugian ke depan. Padahal, perhitungan pencadangan sebelumnya didasarkan pada kredit macet yang sudah terjadi. Hal ini yang dinilai kurang menguntungkan bank dalam jangka pendek. Penerapan PSAK 71 bakal menggerus modal bank.

Ketentuan ini memang mensyaratkan bank untuk mengalokasikan pencadangan lebih besar agar bisa lebih siap dalam menghadapi krisis (*forward looking*). Sebelum diberlakukan, bank harus mempersiapkan analisis kesenjangan (*gap analysis*), dan melakukan simulasi dampak yang akan terjadi. Simulasi ini seharusnya sudah dilakukan tahun lalu.

semuanya,” ujarnya sesuai mengisi acara di sebuah seminar, akhir Maret 2019.

Menurutnya, dengan analisis kesenjangan dan simulasi tersebut, otoritas memiliki informasi yang lebih dalam terkait dengan kebutuhan dan kesulitan dari perbankan. Dengan begitu, otoritas dapat membantu dan melakukan arahan dalam implementasi itu.

Dia menyampaikan, masih banyak bank yang belum melakukan persiapan implementasi PSAK 71. Namun, Roberto belum bisa memastikan jumlah bank yang belum melakukan persiapan itu.

Menurutnya, bank yang belum melakukan persiapan tersebut berasal dari Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) III, II, dan I. Bahkan, dia memastikan bahwa hampir semua bank pembangunan daerah di luar Jawa dipastikan masih belum melakukan persiapan tersebut.

Dia menyadari ada keresahan bank dalam implementasi PSAK 71, seperti banyaknya divisi kerja yang terlibat dalam proses implementasi, keresahan terhadap tergerusnya arus kas pada awal pencadangan, hingga turunnya kredibilitas perseroan karena penyusutan laba.

Namun, di sisi lain, PSAK 71 justru memberi manfaat yang lebih banyak. PSAK 71 akan meminimalisir perilaku *profit taking* berlebihan dari manajemen. Dengan demikian, perseroan mendapat laba yang lebih stabil karena pencadangan dilakukan lebih tepat dan cermat.

“Coba kalau lihat sekarang, ada bank yang labanya naik berkali-kali lipat, tapi tahun berikutnya juga turun berkali-kali lipat. Ini kan sebenarnya aneh, walau itu juga bisa dijelaskan,” tuturnya. ●

PSAK 71 justru memberi manfaat yang lebih banyak. PSAK 71 akan meminimalisir perilaku *profit taking* berlebihan dari manajemen. Dengan demikian, perseroan mendapat laba yang lebih stabil karena pencadangan dilakukan lebih tepat dan cermat.



positifnya, PSAK 71 dinilai mampu memitigasi risiko perbankan ke depan. Pasalnya, bank harus menyisihkan biaya pencadangan berdasarkan data historis yang digabungkan dengan potensi kerugian ke depan.

Dengan PSAK 71, bank harus menambah lebih banyak modal sesuai dengan peningkatan beban pencadangan. Metode perhitungan pencadangan diubah menjadi

Analisis Eksekutif Senior Deputy Komisioner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Roberto Akyuwen mengatakan, implementasi PSAK 71 memang tidak mudah, karena membutuhkan kesiapan dan tambahan cadangan modal. “Sebenarnya proses implementasi ini sederhana, yang terpenting hanya komunikasi, konsultasi, dan mampu menyediakan asistensi, sehingga bisa terealisasi



Ganti Rugi untuk Investor

Pada 18 Maret 2019, Otoritas Jasa Keuangan merilis rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund* di Bidang Pasar Modal untuk meminta tanggapan dari para pelaku jasa keuangan dan masyarakat umum alias *public hearing*.

Regulasi ini merujuk pada praktik aturan *Fair Fund and Disgorgement Plans* milik Komisi Bursa dan Sekuritas (SEC) Amerika Serikat. Dalam draft POJK tersebut, OJK menjelaskan bahwa *disgorgement* merupakan perintah tertulis OJK kepada pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal untuk mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah atau melawan hukum, sehingga pihak tersebut dapat dicegah untuk menikmati hasil keuntungan ataupun melakukan pelanggaran kembali.

Regulasi ini nantinya memberikan wewenang bagi OJK untuk

mengenaikan *disgorgement* kepada pihak yang melakukan pelanggaran perundang-undangan di pasar modal. *Disgorgement* ini pun dapat berbunga bila pihak yang terkena perintah ini belum membayar kewajiban uang.

Pihak yang terkena *disgorgement* wajib membayarkan uang dalam waktu 30 hari sejak dikeluarkannya *disgorgement*. Bila melewati batas waktu itu, OJK akan memberikan surat teguran pertama, bunga 2%, dan perpanjangan 30 hari. Jika masih belum dipenuhi, OJK memberikan surat teguran kedua, bunga tambahan 2% dan perpanjangan 30 hari lagi. Apabila tidak kunjung dipenuhi, pihak pelanggar akan dikenakan bunga sekali lagi, sekaligus tindak lanjut proses hukum,

entah penyidikan, gugatan, atau permohonan pailit.

Draft regulasi ini mengatur pula tentang *disgorgement fund*, yakni dana yang dihimpun dari pengenaan *disgorgement* dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada pihak yang dirugikan atas tindakan pihak pelanggar hukum.

Pihak yang dirugikan itu terlebih dahulu harus sudah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang ditentukan.

Disgorgement fund dikelola oleh administrator yang ditunjuk oleh OJK. Administrator adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh OJK untuk mengadministrasikan *disgorgement fund*. OJK menerbitkan surat edaran terpisah yang mengatur

tentang ketentuan lanjutan tentang administrator dan kewenangan OJK terhadap pihak yang tidak melakukan pembayaran *disgorgement* secara penuh.

Tujuan dari kebijakan *disgorgement* dan *disgorgement fund* adalah melindungi investor pasar modal ketika mengalami kerugian investasi di pasar modal akibat tindak pidana pihak lain. Melalui kebijakan ini, investor memiliki peluang untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Pasalnya, selama ini, pelaku kejahatan di pasar modal hanya berakhir di meja hijau tanpa mengembalikan hak dari pihak-pihak yang dirugikan. Sebelum dibawa ke pengadilan, pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum diwajibkan untuk membayar uang ganti rugi. Dana tersebut akan ditampung dalam *disgorgement fund*.

Batas waktu yang diberikan bagi pembayaran dana *disgorgement* adalah 30 hari sejak penerimaan penetapan *disgorgement*. OJK akan memberikan surat teguran maksimum dua kali, dengan penambahan waktu tunda masing-masing 30 hari, bila pihak pelanggar belum juga membayarnya.

Bersama dengan itu, OJK memberlakukan denda bunga keterlambatan sebesar 2% per bulan dengan maksimum 6%. Artinya, setelah lewat 3 kali 30 hari, OJK berwenang untuk memproses kasusnya ke tahap penyidikan, mengajukan gugatan, atau mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Dalam draft POJK disebutkan bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindak pelanggaran hukum pihak lain di pasar modal harus mengajukan klaim terlebih

dahulu bila ingin mendapatkan dana ganti rugi. Administrator *disgorgement fund* akan mengatur tata cara pengajuan klaim.

Administrator akan memastikan pihak yang mengajukan klaim belum mengajukan upaya hukum lain, sedang mengajukan upaya hukum lain, atau tidak akan mengajukan upaya hukum lain sehubungan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang sama, kecuali ditetapkan lain oleh OJK.

Bila *disgorgement fund* yang terkumpul lebih besar dari jumlah klaim, pihak-pihak yang dirugikan akan mendapatkan dana sesuai dengan jumlah klaim masing-masing, sedangkan sisanya dimasukkan ke rekening yang ditetapkan OJK. Namun, jika lebih kecil dari total klaim, masing-masing pihak akan mendapatkan dana dengan pembagian secara proporsional.

OJK menegaskan bahwa *disgorgement fund* bukanlah penerimaan OJK dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional OJK. Dana itu hanya dapat digunakan OJK untuk kepentingan pengembangan industri pasar modal serta membiayai kegiatan operasional administrator. Regulasi baru ini rencananya berlaku 2 tahun setelah diundangkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menuturkan, regulasi tersebut ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada investor, sehingga makin banyak masyarakat yang percaya diri untuk mulai menjadi investor di pasar modal.

Namun demikian, tegasnya, ganti rugi yang diatur dalam *disgorgement* tidak berlaku untuk kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi harga saham maupun kesalahan cara investasi dari investor. “Rugi karena salah beli saham karena harga naik-turun itu wajar. Tapi, rugi karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana ini yang coba kami bahas,” jelasnya. ●





Investasi untuk Generasi

MILENIAL



Kata milenial kini seolah menjadi magnet bagi seluruh industri. Semua pelaku industri beramai-ramai mendesain produk-produk yang cocok untuk para generasi milenial. Milenial sendiri merupakan generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980–2000 atau disebut juga dengan istilah generasi Y.

Milenial yang merupakan bonus demografi yang dimiliki Indonesia ini memiliki populasi mencapai 90 juta orang atau lebih dari sepertiga jumlah penduduk di negeri ini. Generasi milenial identik dengan generasi yang melek teknologi, kecanduan internet, suka dengan petualangan, kerja cepat dan cerdas, bebas dan tidak terikat, suka berbagi, dan konsumtif alias boros.

Mengingat generasi milenial masuk dalam kategori usia produktif, tentu sangat disayangkan apabila

tidak memiliki instrumen investasi untuk meng-*cover* kehidupannya saat masa pensiun nanti.

Data *Global Wealth Report* 2017 yang dipublikasikan oleh Credit Suisse Research Institute melaporkan bahwa generasi milenial merupakan generasi yang tidak beruntung terutama dalam persoalan ekonomi. Generasi milenial saat ini menghadapi masalah pengangguran yang lebih tinggi, krisis ekonomi yang lebih sering, ketidaksetaraan pendapatan, dan harga properti yang tinggi.



Sayangnya, dalam situasi seperti itu generasi milenial umumnya justru terjebak pada gaya hidup konsumtif dan haus akan pengalaman. Oleh karena itu, memiliki instrumen investasi menjadi sebuah keniscayaan bagi generasi milenial agar bisa bertahan hidup sampai dengan masa pensiun.

Tentu banyak instrumen investasi yang bertebaran di pasar saat ini, mulai dari deposito, emas, forex, saham, reksa dana, hingga investasi langsung dalam bentuk kepemilikan properti. Lalu instrumen investasi apa yang aman dan cocok bagi generasi milenial?

Head of Wealth Management & Client Growth Bank Commonwealth Ivan Jaya mengatakan, sebelum memilih instrumen dan menentukan alokasi investasi,

milenial harus terlebih dahulu mengelola keuangannya dengan ideal. Menurutnya, milenial bisa mengalokasikan bagian-bagian dari pendapatannya dengan porsi 50:30:20 yakni 50% untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan, 30% untuk membayar segala cicilan, dan sisanya 20% bisa dialokasikan untuk ditabung atau diinvestasikan.

Dia menjelaskan, bagi kaum milenial yang masih ragu untuk menyentuh instrumen investasi alias konservatif, bisa memilih instrumen investasi reksa dana karena dikelola oleh manajer investasi sehingga potensi risiko bisa diminimalisir. Sebagai informasi, manajer investasi adalah profesional yang bersertifikat dalam hal investasi di pasar modal. “Kalau untuk jangka panjang, berinvestasi reksa dana saham pasti akan untung karena terbawa inflasi yang menguntungkan pendapatan dari perusahaan,” jelas Ivan, Selasa (26/02/2019).

Dia mencontohkan, apabila dalam jangka 10 tahun ke depan seseorang memiliki rencana yang membutuhkan dana besar, seperti menikah maupun menyekolahkan anak, tentu berinvestasi di reksa dana lebih membantu.

Simulasinya adalah seseorang mengalokasikan dana Rp100.000 per bulan selama 10 tahun. *Pertama*, apabila dana tersebut disimpan di bawah bantal, 10 tahun kemudian akan terkumpul Rp12 juta.

Kedua, bila dana tersebut ditempatkan di tabungan, misal dengan bunga kotor 2%, akan terkumpul sekitar Rp13,1 juta selama 10 tahun. *Ketiga*, bila dana tersebut dibelikan emas atau tabungan emas, dalam 10 tahun akan menghasilkan Rp17,5 juta.

Keempat, bila uang tersebut diinvestasikan di reksa dana saham selama 10 tahun dengan rata-rata *return* per tahun sekitar 20%, dana yang terkumpul bisa mencapai Rp38 juta. “Jadi perbandingannya jelas,” tegasnya.

Namun demikian, Ivan mengatakan bahwa dalam investasi reksa dana memiliki tingkat risiko yang berbeda tergantung jenis reksa dana.

Milenial Agresif

Adapun bagi kelompok milenial yang agresif, yakni ingin untung besar dalam waktu yang singkat, bisa langsung berinvestasi pada instrumen saham. Namun demikian, disarankan agar semua keputusan diambil dengan pertimbangan yang rasional agar tidak terjebak pada investasi yang spekulatif.

Selain instrumen reksa dana dan saham, generasi milenial juga bisa berinvestasi dalam instrumen surat utang ritel pemerintah, yakni Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Ritel Indonesia (Sukri), *Saving Bond Ritel* (SBR), dan Sukuk Tabungan (ST).

Jenis obligasi ritel ini merupakan instrumen investasi jangka pendek dengan *return* tinggi yang relatif aman bagi generasi milenial. Pasalnya, semua jenis surat utang ritel tersebut dijamin oleh negara, sehingga potensi gagal bayar alias *default*-nya sangat kecil.

Selain sebagai saran investasi, dengan memiliki obligasi ritel negara, milenial juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan negeri. Pasalnya, dana yang dihimpun dari penerbitan obligasi ritel negara akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan.

Dari sisi aksesibilitas, baik instrumen reksa dana, saham, maupun obligasi negara ritel, semuanya bisa diakses secara *online* sehingga sangat cocok dengan perilaku generasi milenial yang sangat bergantung pada teknologi dan internet.

Jadi bagi Anda yang merasa bagian dari milenial, mari rencanakan masa pensiun Anda dengan berinvestasi agar tidak menyesal kemudian. Dan waktu yang tepat untuk memulai investasi adalah sekarang. Tunggu apalagi, Ayo Berinvestasi *Gaez!* ●

Mewujudkan Pinjaman *Online* yang Profesional

Pada Jumat (08/03/2019), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengukuhkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi resmi penyelenggara *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending*

Peresmian AFPI yang berlangsung di Gedung Bursa Efek Indonesia tersebut ditandai dengan pelantikan jajaran pengurus AFPI periode 2019-2021 oleh Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi. AFPI sendiri telah dibentuk sejak 5 Oktober 2018.

Turut hadir dalam acara peresmian AFPI antara lain Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Riswinandi, jajaran direksi Bursa Efek Indonesia, dan jajaran pengurus dan anggota AFPI. Dalam acara peresmian tersebut, AFPI juga meluncurkan saluran informasi dan pengaduan nasabah *P2P Lending* yang diberi nama Jendela.

Sebagaimana diketahui, maraknya kasus penagihan yang melibatkan *fintech P2P lending* atau pelaku pinjaman *online* (pinjol) memang sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, cara penagihan pinjaman *online* ini kurang pantas, yakni dengan cara mengancam hingga menagih lewat orang yang ada pada daftar kontak ponsel milik konsumen.

Oleh karena itu, nasabah yang memiliki keluhan terkait penagihan pinjol dapat melapor melalui Jendela. Untuk keluhan atau pengaduan bisa disampaikan kepada Jendela AFPI melalui dua cara, yaitu *pertama*, menghubungi *customer service*, *hotline center* melalui telepon *call center* di 021 50821960 (bebas pulsa)

di jam kerja: Senin-Jumat pukul 08.00–17.00 WIB.

Kedua, melaporkan keluhan via *email*: pengaduan@afpi.or.id atau bisa juga menyampaikan melalui *website* <https://www.afpi.or.id/contact>.

Keberadaan AFPI diharapkan bisa menjadi mitra strategis OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan para penyelenggara *P2P lending* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik penyimpangan oleh pelaku pinjol.

Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 Bab XII Pasal 48, seluruh penyelenggara *fintech P2P lending* di Indonesia wajib mendaftarkan diri sebagai anggota AFPI.

Berdasarkan data OJK per 15 Mei 2019 tercatat sebanyak 113 *Fintech P2P Lending* yang terdaftar di OJK. Adapun pinjol yang terdaftar sebagai anggota AFPI per Mei 2019 tercatat sebanyak 91 pinjol antara lain Akseleran, Crowde, Dana Cita, *Easy Cash*, Dompot Kilat, iKredo, Kredit Cepat, Kredit Pro, Kredivo, Lahan Sikam, Pinjam Duit, Pinjam Yuk, Rupiah Cepat, dan Uang Teman.

Keseluruhan pinjol anggota AFPI berikut detail profil perusahaannya dapat diakses langsung di situs resmi AFPI yakni www.afpi.or.id.

Sertifikasi

Setiap calon penyelenggara pinjol yang akan mendaftar menjadi anggota AFPI harus mengikuti *training* dan mengikuti ujian untuk





Keberadaan AFPI diharapkan bisa menjadi mitra strategis OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan para penyelenggara P2P lending sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik penyimpangan oleh pelaku pinjol.

memperoleh sertifikasi terlebih dahulu dari AFPI. Tahap selanjutnya, penyelenggara pinjol bisa mendaftar ke OJK.

Pemberian sertifikasi adalah salah satu dari fungsi keberadaan AFPI untuk menjalankan pengawasan dan pengaturan kepada anggotanya agar menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan melindungi nasabah. Selain sertifikasi kepada jajaran komisaris, direksi, dan pegawai penyelenggara pinjol, AFPI juga mewajibkan sertifikasi kepada para penagih utang.

Adanya sertifikasi tersebut ditujukan untuk memberikan pelatihan penagihan utang yang benar agar tidak meresahkan para nasabah pinjol. Pasalnya, standar praktik bisnis perlu diwujudkan guna melindungi baik nasabah maupun penyelenggara.

Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi menjelaskan, kehadiran AFPI sebagai wadah bagi seluruh penyelenggara pinjol demi meningkatkan kapasitas bersama agar dapat memaksimalkan

fungsinya bagi masyarakat Indonesia yang selama ini belum memiliki akses ke jasa keuangan konvensional. “Diharapkan dengan keberadaan asosiasi, industri *fintech P2P lending* dapat bertumbuh kuat dan sehat, serta bermanfaat bagi kalangan yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional,” jelasnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Riswinandi mengatakan, masyarakat Indonesia sudah mulai akrab dengan pinjol sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga dengan mengutamakan aspek perlindungan terhadap konsumen. “OJK berharap AFPI dapat mengembangkan industri sehat, kompetitif, dan dijalankan dengan *good corporate government*, mementingkan aspek perlindungan konsumen, dan adil atas pelanggaran yang diberikan,” tuturnya.

Berdasarkan data OJK per Januari 2019, penyaluran pinjaman *fintech P2P lending* tercatat telah mencapai Rp25,59 triliun dari 99 penyedia layanan telah terdaftar yang bergerak

di bidang produktif, multiguna, konsumtif, dan syariah.

Dari sisi *lender*, sudah ada 267.496 entitas yang memberikan pinjaman kepada lebih dari 5 juta masyarakat dengan lebih dari 17 juta transaksi. Seluruh anggota AFPI merupakan perusahaan *fintech P2P lending* yang sudah terdaftar di OJK.

Segmen nasabah pinjol juga sangat luas, yakni pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ibu rumah tangga, mahasiswa, dan generasi milenial. Berbagai kebutuhan seperti pendanaan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kepemilikan properti bisa menggunakan layanan pinjol.

Adrian menyatakan bahwa AFPI hadir untuk turut mendukung program pemerintah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Pemanfaatan *fintech P2P lending* diharapkan dapat mengisi kebutuhan kredit masyarakat khususnya UMKM. Menurut data World Bank dan IFC, kebutuhan kredit UMKM sebesar US\$165 miliar atau 19% dari PDB. ●



Bersama Memerangi Investasi Ilegal

Meski telah melakukan berbagai tindakan mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga penindakan, praktik investasi ilegal masih saja terjadi dan nilai kerugian yang diakibatkan pun semakin menggunung.

ronisnya, jumlah kasus investasi ilegal yang ditangani oleh Satgas Waspada Investasi pun bertambah setiap tahun. Pada 2017, tim berhasil menghentikan 80 entitas investasi ilegal di mana mayoritas berbentuk pasar uang. Pada 2018, jumlah entitas yang dihentikan Satgas naik menjadi 108 entitas investasi ilegal dan 404 entitas *fintech peer to peer (P2P) lending*.

Selanjutnya, sepanjang kuartal I/2019 ada 47 entitas investasi ilegal dan 399 entitas *fintech P2P lending* yang ditutup oleh Satgas.

Dari sisi kerugian, sepanjang 2008 hingga 2018, Satgas Waspada Investasi memperkirakan total kerugian yang diakibatkan oleh praktik investasi ilegal mencapai Rp88 triliun. Dari total kerugian tersebut antara lain kasus Pandawa Group yang menawarkan imbal hasil 10% setiap bulan dengan total kerugian mencapai Rp3,8 triliun dari 549.000 nasabah. Ada juga kasus investasi konsorsium

mendulang emas dengan imbal hasil 5% per bulan dengan total kerugian mencapai Rp1,6 triliun.

Selain itu, ada juga kerugian dari kasus travel umrah yang memakan korban 164.757 nasabah dengan kerugian mencapai Rp3,04 triliun.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur penawaran investasi dengan imbal hasil tinggi sehingga menjadi target dari praktik investasi ilegal tersebut.

“Umumnya, pelaku investasi ilegal menawarkan jumlah bunga yang tinggi dan masyarakat pun mudah tergiur, tawaran keuntungan bunga 1% setiap hari hingga 30% itu sangat tidak masuk akal,” katanya dalam acara Sosialisasi Satgas Waspada Investasi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (05/04/2019).

Berkaca dari berbagai kasus investasi ilegal yang sudah terjadi, Tongam menghimbau masyarakat agar dapat lebih cermat dan teliti

sebelum memutuskan untuk berinvestasi agar tidak terjerumus ke dalam praktik investasi ilegal.

Menurutnya, lebih baik berhati-hati dan teliti ketimbang menyesal di kemudian hari. Pasalnya, total kerugian yang diakibatkan oleh investasi ilegal, mayoritas tidak dapat digantikan oleh aset pelaku yang disita dalam rangka pengembalian dana masyarakat.

Setidaknya ada lima karakteristik dari praktik investasi ilegal yakni *pertama*, investasi tersebut menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. *Kedua*, klaim investasi tanpa risiko (*free risk*), padahal, prinsip berinvestasi adalah *high risk, high return*.

“Tidak logis kasih keuntungan 3% per hari, kalau bisa begitu, tentunya penyedia investasi lebih baik ambil keuntungan sendiri, tidak dibagi-bagi,” jelas Tongam.

Ketiga, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru atau *member get member* atau seperti

praktik dalam bisnis *Multi Level Marketing* (MLM). Praktik ini akan membuat anggota tak lagi fokus berjualan barang, tetapi lebih fokus menjaring anggota baru untuk mendapatkan insentif atau bonus besar.

Keempat, memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau *public figure* untuk menarik minat investasi seperti kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di Cirebon yang mencatut figur seorang tokoh agama. Padahal tokoh agama tersebut tidak terlibat dalam kegiatan investasi tersebut.

Kelima, legalitas perusahaan investasi ilegal tidak jelas atau tidak berizin. Kalaupun memiliki izin, jenis izin yang dikantongi hanya izin lembaga sedangkan izin usahanya tidak memiliki atau memiliki izin usaha tapi tidak sesuai dengan peruntukannya.

Modus kegiatan perdagangan berjangka komoditas ilegal antara lain melakukan duplikasi situs pialang berjangka legal, memberikan penawaran *fixed income*, dan keuntungan yang besar di luar kewajaran.

Oleh karena itu, jika masyarakat menjumpai tawaran investasi yang memenuhi lima karakteristik tersebut, sebaiknya jangan bergabung dan laporkan kepada pihak berwenang.

Khusus untuk modus *fintech P2P lending*, Tongam menjelaskan bahwa menjamurnya *fintech P2P* ilegal disebabkan dua hal yakni mudahnya pelaku dalam membuat aplikasi dan besarnya permintaan (*demand*) dari masyarakat. Masyarakat yang terkena biasanya kalangan menengah bawah yang kesulitan mengakses pendanaan dari lembaga resmi seperti perbankan.

"*P2P* ilegal menawarkan syarat pinjaman yang mudah, tetapi nanti akan mencekik konsumen dengan bunga tinggi," jelas Tongam.

Selain itu, *P2P* ilegal juga akan menyebarluaskan data pribadi nasabah dalam proses penagihan.

Sepanjang 2018-2019, satgas telah menghentikan 803 entitas *fintech P2P* ilegal. Dari jumlah tersebut, 40% lokasi servernya tidak diketahui, 38% servernya di luar negeri, dan 22% servernya berlokasi di Indonesia. Adapun, *fintech P2P lending* yang resmi terdaftar di OJK baru berjumlah 113 perusahaan.

Terkait dengan praktik investasi ilegal, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan juga ikut melakukan penindakan. Pada Januari 2019, lembaga ini memblokir 63 situs Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK) ilegal. Sebelumnya, pada tahun lalu Bappebti juga telah memblokir 161 situs. Jumlah tersebut meningkat dari 2017 yang hanya 107 situs PBK.

Kepala Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi Bappebti Taufik mengatakan, peningkatan jumlah situs PBK yang diblokir sejalan dengan maraknya bermunculan investasi PBK *online*. "Perusahaannya sama, timbul lagi tetapi dengan nama yang berbeda, tinggal menambahkan *dash* atau *dot* dalam alamat situsnya. Jadi seperti tidak akan berhenti," jelasnya.

Modus kegiatan perdagangan berjangka komoditas ilegal antara lain melakukan duplikasi situs pialang berjangka legal, memberikan penawaran *fixed income*, dan keuntungan yang besar di luar kewajaran. Praktik lainnya adalah terselubung melalui kegiatan seminar, edukasi, dan pelatihan dengan penarikan margin untuk tujuan transaksi tanpa mengantongi izin dari Bappebti.

Agar tidak menjadi korban dari praktik investasi ilegal, *P2P* ilegal, dan PKB ilegal, masyarakat bisa menggunakan rumus 2 L yakni legal dan logis. Legal terkait dengan legalitas perusahaan, situs, wakil pialang, dan produk investasinya. Adapun logis terkait dengan tawaran imbal hasil, risiko, dan tata cara bertransaksi. ●



Mudahnya Menjadi Investor Pasar Modal

Tahun ini, otoritas pasar modal menargetkan jumlah investor berdasarkan *Single Investor Identification (SID)* bisa tembus 2,5 juta *SID* dari posisi per Maret 2019 yang mencapai 1,7 juta investor.

Untuk mengejar target tersebut, otoritas pasar modal melakukan beberapa terobosan, salah satunya adalah mengoptimalkan simplifikasi pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah.

Pada Kamis (28/03/2019), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan program simplifikasi Pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik. Dengan simplifikasi ini, pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah kini bisa diproses paling cepat 30 menit atau tak lagi harus menunggu hingga dua pekan.

Meski dilakukan simplifikasi, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, tetapi program penyederhanaan ini diklaim tetap menjaga tingkat keamanan transaksi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan, program simplifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi jasa keuangan di bidang pasar modal. “Ini merupakan gong dimulainya implementasi penyederhanaan pembukaan rekening efek dan

rekening dana nasabah secara elektronik dengan menyinergikan pemanfaatan *Customer Due Diligence (CDD)* pihak ketiga antara bank-bank administrator rekening dana nasabah dan perusahaan efek,” katanya.

Secara legal formal, program simplifikasi ini dipayungi oleh ketentuan berupa Surat Edaran OJK No 6/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

SE OJK tersebut mengatur perihal pedoman teknis pembukaan rekening efek nasabah dan rekening dana nasabah secara elektronik, penyediaan CDD pihak ketiga, dan pedoman formulir pembukaan rekening untuk nasabah individual.

Melalui SE OJK ini, perusahaan efek dapat memberikan layanan pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah secara lebih cepat. Berbeda ketika mekanisme *on boarding* atau pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah yang dilakukan secara manual.

Menurut Hoesen, jeda paling cepat untuk membuka rekening efek secara *online* adalah berkisar 30 menit. Selain proses yang lebih cepat, program simplifikasi ini juga berpotensi memperluas jangkauan perusahaan efek dalam memberikan layanan kepada investor, sehingga dapat mengatasi masalah terbatasnya jaringan pemasaran perusahaan efek yang umumnya berpusat di kota besar.

Direktur KSEI Alec Syafruddin menuturkan, proses simplifikasi ini akan tetap memperhatikan aspek keamanan. “Kalau buka rekening kan secara keamanan akan lebih ke arah apakah data itu benar milik orang yang bersangkutan. Salah satu yang menjadi perhatian itu kan jangan sampai ada akun abal-abal begitu,” tegasnya.

Menurutnya, berbagai upaya penipuan seperti calon investor memberikan identitas palsu untuk memanipulasi pasar atau melakukan tindak pencucian uang, diharapkan bisa terdeteksi atau dicegah dengan prosedur *video call*. “Itu risiko-risiko yang sebetulnya kenapa dulu peraturan *KYC (know your customer)*



16 Perusahaan Efek yang Ikut Serta dalam Program Simplifikasi:

- RHB Sekuritas Indonesia
- Mandiri Sekuritas
- Trimegah Sekuritas Indonesia
- BNI Sekuritas
- Philips Sekuritas
- Pacific 2000 Securities
- Mirae Asset Sekuritas
- BCA Sekuritas
- Indo Premier Sekuritas
- Universal Broker Indonesia Sekuritas
- Ekuator Swarna Sekuritas
- Jasa Utama Capital
- Kresna Sekuritas
- CIMB Sekuritas
- Maybank Kim Eng
- Minna Padi Investama Sekuritas

5 Bank RDN yang Ikut Serta dalam *Pilot Project*

mandiri
Bank Mandiri

BCA
Bank Central Asia

BNI
Bank Negara Indonesia

PaninBank
Bank Panin

Bank Rakyat Indonesia

itu dibuat ketat. Sekarang kan teknologinya ada, ketentuan di SE OJK itu sebenarnya ingin membuat proses itu sederhana, lebih rileks, tapi juga tetap menjaga tingkat risikonya pada level risiko yang terjaga,” jelasnya.

Sementara Direktur Utama BEI Inarno Djajadi menjelaskan bahwa program simplifikasi ini merupakan jawaban untuk berbagai keluhan nasabah terutama yang berada di luar Pulau Jawa. Dengan adanya kemudahan ini, dia berharap inklusi keuangan di bidang pasar modal bisa meningkat disertai dengan meningkatnya jumlah investor.

Dalam program simplifikasi ini, otoritas pasar modal menggandeng 16 perusahaan efek dan lima bank RDN.

Sebagai pihak yang terlibat dalam program simplifikasi ini, Direktur Operasional PT Mandiri Sekuritas Heru Handayanto menilai program simplifikasi pendaftaran rekening efek dan rekening dana nasabah ini dapat membantu untuk

meningkatkan jumlah investor baru pada tahun ini.

Pada tahap awal, jelasnya, Mandiri Sekuritas akan mencoba menggaet nasabah-nasabah dari induk usaha yakni Bank Mandiri. Sementara itu, untuk nasabah non-Bank Mandiri, pihaknya masih mengkaji terkait dengan CDD dari pihak ketiga.

Pasalnya, merujuk pada SE OJK No. 6/SEOJK.04/2019, perusahaan efek dapat memanfaatkan CDD yang telah dilakukan bank atas nasabahnya dan dapat digunakan sebagai basis CDD dalam pembukaan RDN bagi calon investor di bursa.

Menurutnya, sebelum adanya program simplifikasi ini, proses pembukaan rekening efek di Mandiri Sekuritas biasanya memakan waktu hingga lima hari kerja untuk wilayah Jawa. Adapun untuk wilayah luar Jawa bisa memakan waktu hingga dua pekan karena ada proses pengiriman dokumen, pencetakan dokumen, tanda tangan, pengiriman ulang,

dan sebagainya. “Kami berharap *back-off* bisa berkurang banyak. Karena ada calon investor yang sudah niat tapi mundur karena prosedur yang rumit tadi,” ujarnya.

Komite Ketua Umum APEI Octavianus Budiyanto menilai, penyederhanaan pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah menjadi penting mengingat perubahan pola investor. Dia menjelaskan, berdasarkan data BEI per Desember 2018, pertumbuhan investor milenial berusia 18 tahun—25 tahun naik 116,78% menjadi 149.386 investor dibandingkan dengan sejak akhir 2016.

Artinya, antusiasme yang tinggi dari kelompok milenial dalam berinvestasi di pasar modal harus diakomodir dengan sistem yang *market friendly* dengan generasi ini. “Kalau mereka [kelompok milenial] kan tidak suka dengan yang terlalu *paperwork*. Kalau bisa pakai teknologi ya pakai teknologi,” jelasnya. ●

Mewujudkan Target 75 Emiten Baru

Tahun ini, Bursa Efek Indonesia kembali ingin mencetak rekor penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering/ IPO*) dengan target 75 emiten baru atau meningkat dibandingkan dengan *IPO* saham tahun lalu yang mencapai 57 emiten.

Optimisme tersebut didasarkan pada kondisi pasar tahun ini yang dinilai relatif lebih terkendali dibandingkan dengan tahun lalu yang sangat fluktuatif.

Sepanjang Januari hingga 20 Mei 2019, terdapat 12 emiten yang telah mencatatkan sahamnya di lantai bursa.

Saat ini, Bursa Efek Indonesia juga sudah mengantongi 27 *pipeline* perusahaan yang siap *IPO* hingga periode Juli-Agustus 2019 senilai Rp1,39 triliun. Jika semua *pipeline* tersebut terealisasi, otoritas bursa tinggal mencari 36 calon emiten untuk menggenapi target 75 emiten baru pada tahun ini.

Direktur Penilaian Perusahaan I Gede Nyoman Yetna mengatakan, dari tahun ke tahun minat *IPO* menunjukkan grafik pertumbuhan. Namun demikian, jelasnya, secara global, representasi Indonesia masih tertinggal dari sisi jumlah perusahaan tercatat. Sampai saat ini, total emiten yang tercatat adalah 629 perusahaan publik atau masih jauh tertinggal dibandingkan dengan India yang mencatatkan 5.000 emiten.

Bahkan dibandingkan dengan bursa Thailand dan Singapura, Indonesia juga masih tertinggal di mana bursa Thailand memiliki 704 emiten dan bursa Singapura memiliki 741 emiten. “Kami diamanahkan untuk membuka kesempatan dan membantu perusahaan lainnya yang berniat untuk mencatatkan diri. Selanjutnya, juga kami

mengharapkan akan ada kebijakan yang memberikan angin segar,” katanya, Senin (29/04/2019).

Head of Listing and Services Development BEI Saptono Adi Junarsi menambahkan, saat ini BEI bersama Ditjen Pajak tengah menggodok insentif lanjutan untuk bisa menarik minat perusahaan melantai di bursa saham.

Dia menjelaskan, selama 2 tahun terakhir kecenderungan perusahaan melakukan *IPO* adalah tidak lagi menunggu skala ukuran perusahaan menjadi besar. Aksi *IPO* justru dianggap sebagai jalan bagi perusahaan untuk bisa tumbuh besar.

Kedepan, dia berharap *IPO* akan menjadi salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan di bidang kreatif dan nonkonvensional. “Penyebarannya lebih merata dari industrinya dan sektornya. Jadi sebenarnya *everyone could IPO*

bukan hanya Air Asia yang *everyone could fly*,” ujarnya.

Selain insentif perpajakan, BEI akan banyak melakukan kegiatan *workshop go public* di berbagai kota di Indonesia dan ditindaklanjuti dengan pertemuan satu per satu dengan perusahaan-perusahaan yang prospektif.

BEI juga akan menggandeng banyak pihak untuk melakukan literasi pasar modal antara lain asosiasi korporasi sektoral, bank bersama debiturnya, serta lembaga-lembaga strategis lain seperti lembaga pemeringkat.

Optimistis Tercapai

Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee optimistis target emiten baru sebanyak 75 pada tahun ini akan tercapai seiring dengan laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang diperkirakan bisa menembus level



Emiten Baru

PT Jasnita Telekomindo Tbk.
 PT Bliss Properti Indonesia Tbk.
 PT Menteng Heritage Realty Tbk.
 PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.
 PT Meta Espi Tbk.
 PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
 PT Armada Berjaya Trans Tbk.

PT Citra Putra Realty Tbk.
 PT Nusantara Properti Internasional Tbk.
 PT Estika Tata Tiara Tbk.
 PT Pollux Investasi Internasional Tbk.
 PT Sentra Food Indonesia Tbk.

Sumber: BEI

7.000 setelah pembentukan kabinet pemerintah yang baru nanti.

Selain itu, situasi ekonomi global diharapkan tidak terlalu bergejolak agar tidak berpengaruh terhadap stabilitas bursa saham di dalam negeri.

Presiden Direktur BCA Sekuritas Mardy Susanto mengatakan, sentimen perang dagang antara Amerika Serikat dan China akan menjadi salah satu pertimbangan bagi perusahaan untuk menggelar *IPO*. “Namanya *IPO* pasti dinamis sesuai dengan *market dynamics*. Kalau tidak optimal, maka kami yang memberi beri saran kepada calon emiten untuk lebih baik menunda,” jelasnya, Selasa (14/05/2019).

Untuk sentimen dari dalam negeri, menurutnya, proses politik yang berjalan dengan damai dengan hasil akhir yang sesuai ekspektasi pasar, akan menggairahkan kembali kondisi pasar modal. “Maka sangat

mungkin setelah Lebaran, pasar modal akan mulai bergairah kembali, walaupun risiko-risiko eksternal yang di luar kontrol pemerintah masih terus berpotensi menghantui semua negara berkembang,” tuturnya.

Keputusan calon emiten untuk mengeksekusi rencana *IPO* memang tak terlepas dari situasi pasar. Dan saat ini, situasi pasar saham di dalam negeri sedang terkoreksi akibat sentimen perang dagang dan perlambatan ekonomi global.

Sementara itu, Nafan Aji, analis Binaartha Sekuritas menilai minat *IPO* akan kembali menggeliat pada semester II/2019. Menurutnya, BEI masih memiliki waktu yang cukup hingga akhir tahun untuk merealisasikan target 75 emiten baru.

Selain mengandalkan kondisi pasar yang kondusif, Nafan menyarankan agar BEI rajin melakukan literasi kepada

perusahaan-perusahaan yang potensial melakukan *IPO*.

Meski terdapat kekhawatiran akibat ketidakpastian eksternal yang dipicu oleh perang dagang AS dan China, Direktur *Investment Banking* MNC Sekuritas Dadang Suryanto mengatakan bahwa masih ada optimisme yang berasal dari prospek industri dan pendapatan dari para calon emiten. “Kekhawatiran itu pasti ada, tetapi optimisme juga tetap ada,” ungkapnya, Rabu (15/05/2019).

Dia mencontohkan, calon emiten yang bergerak di industri konsumen diperkirakan akan tetap memiliki prospek bagus karena terkait dengan kebutuhan masyarakat. “Jadi kalau sektornya menjanjikan dan tidak terpengaruh dengan kondisi perang dagang ya jalan terus. Kalau sektornya memang terpengaruh perang dagang, pasti tunda dan *delay* (rencana *IPO*-nya),” jelasnya. ●



Komitmen OJK Jalankan Pembiayaan Berkelanjutan Untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi melalui kerangka keuangan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian bagi lembaga keuangan dunia, termasuk institusi jasa keuangan di Indonesia.

Menjaga lingkungan dari peningkatan emisi gas rumah kaca kian gencar dilakukan. Terlebih Indonesia menjadi salah satu negara yang sepakat akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030.

OJK selaku regulator di Industri Jasa Keuangan (IJK) mendukung semangat ekonomi rendah karbon dengan cara peningkatan keuangan berkelanjutan. OJK menerbitkan aturan agar perbankan meningkatkan portofolio kredit dengan skema keuangan berkelanjutan.

Aturan *sustainable finance* tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan POJK Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan. Otoritas bekerja sama dengan berbagai

institusi dalam menggodok POJK tersebut, seperti International Finance Corporation, United Nation Development Programme, World Wide Fund for Nature, dan lainnya.

Untuk memperkuat komitmen implementasi *sustainable banking*, Wimboh Santoso Ketua Dewan Komisiner OJK menghadiri acara *The 6th Sustainable Banking Network (SBN) Global Meeting* pada acara Tri Hita Karana *Roadmap for Blended Finance* yang diselenggarakan oleh OECD dan Trihita Karana di Washington, Amerika Serikat, Jumat (12/4/2019) waktu setempat.

“Ini merupakan implementasi dari Komitmen IMF/World Bank Meeting mengenai pengembangan pembiayaan berkelanjutan. OJK akan melakukan Pendalaman Pasar Keuangan melalui penciptaan produk keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi

yang perhatikan dampak sosial dan lingkungan,” ujar Wimboh.

Menurut dia, bagi negara berkembang seperti Indonesia, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, antara lain dengan membangun infrastruktur di berbagai daerah.

Namun begitu, pembangunan infrastruktur yang masif ini harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosial masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kemudian hari. Untuk itu, pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan upaya pencapaian *sustainable development goals*.

Wimboh menuturkan, industri jasa keuangan memiliki peran penting untuk menyediakan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui instrumen keuangan berbasis *sustainable/green financing*, sehingga pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dalam koridor ramah lingkungan dan sosial.

Sejumlah hal yang perlu dilakukan untuk mendorong berkembangnya *sustainable finance* yaitu, tersedianya



juga berkesempatan menjadi pembicara utama pada seminar yang digelar Rare Global, Blended Finance Task Force dan The Inter-American Development Bank (IADB) dengan tema seminar “*Mobilising Capital for the Oceans: The New Frontier in Natural Infrastructure Investment*”.

Dalam acara tersebut, Wimboh menyampaikan pentingnya pembiayaan yang inovatif seperti skema *blended finance* untuk menutup kekurangan pembiayaan pengembangan ekonomi maritim. Menurut dia, OJK akan bersinergi dengan Kementerian dan lembaga terkait termasuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam mengembangkan skema *blended finance* melalui *platform* *SDG One*.

Sinergi itu diharapkan dapat membangun ekosistem yang diperlukan dalam pengembangan instrumen keuangan pembiayaan ekonomi maritim yang mampu memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia dan upaya mensejahterakan masyarakat yang tetap ramah lingkungan. ●

program yang sistematis dan masif untuk memastikan kepedulian di semua pemangku kepentingan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, ekosistem yang semakin lengkap, dan komitmen dari komunitas global untuk membantu negara-negara berkembang dalam menyediakan ekosistem yang dibutuhkan.

Dalam konteks pengembangan *sustainable finance* ini, OJK dalam tiga tahun terakhir ini telah melakukan berbagai hal seperti, menyusun *roadmap sustainable finance*, menyediakan kerangka regulasi bagi pembiayaan berkelanjutan, penerbitan *green bonds*/sukuk, sosialisasi dan peningkatan kapasitas pelaku di industri keuangan dengan dukungan dari International Finance Corporation (IFC) dan Sustainable Banking Network (SBN). Tahun ini

IFC berkomitmen untuk masuk pasar *green bonds* Indonesia senilai US\$1,5 miliar.

Usai pertemuan Tahunan Bank Dunia – IMF di Bali tahun lalu, Indonesia mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan global untuk mengembangkan program *sustainable finance* di Indonesia. Dengan dukungan besar dari Tri Hita, Indonesia telah berhasil mendapatkan dana US\$2,46 miliar sebagai komitmen untuk membiayai 31 proyek melalui skema pembiayaan campuran, dari berbagai pemangku kepentingan domestik dan global.

Sebanyak 31 proyek tersebut, enam proyek baru saja selesai pada tahun 2018, sementara sebanyak tujuh proyek akan direalisasikan pada tahun ini.

Dalam kunjungan kerjanya ke Washington DC, Wimboh Santoso

Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau kepada pelaku usaha industri pembiayaan untuk memperbesar porsi pembiayaan produktif guna mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Saat ini, sedikitnya ada tiga tantangan terbesar perusahaan pembiayaan pada tahun 2019, menurut OJK, yakni membangun kepercayaan perbankan, permodalan dan penggunaan teknologi digital. Untuk itu, pelaku usaha pembiayaan harus membuat kebijakan yang lebih selektif dan prudent, serta langkah efisiensi dalam menyikapi keterbatasan sumber pendanaan.

Overview Lembaga Pembiayaan *)

Keterangan	Jumlah Industri (Unit)	Aset (Miliar Rp)	Liabilitas (Miliar Rp)	Ekuitas (Miliar Rp)
1. Perusahaan Pembiayaan	185	503,227	380,239	122,988
2. Perusahaan Modal Ventura Konvensional	66	12,471	6,977	5,494
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2	73,083	34,898	38,185
JUMLAH	253	588,782	422,115	166,667

Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Aset	Piutang Pembiayaan (Miliar Rp)	
	Jan-19	Feb-19
1. Aset < 100 Miliar	848	828
2. Aset 100 Miliar - 500 Miliar	9,822	9,778
3. Aset 500 Miliar - 1 Triliun	20,583	21,111
4. Aset 1 Triliun - 5 Triliun	91,854	91,137
5. Aset > 5 Triliun	315,705	316,978
JUMLAH	438,813	439,832

*) Data termasuk Syariah, Februari 2019.

Sumber: Data Statistik OJK.



Karman Pamurahardjo

Presiden Direktur Profindo Sekuritas Indonesia

Terus Bekerja Keras, Tetap Optimis

Prospektifnya industri pasar modal Tanah Air ternyata mampu menjadi magnet bagi seseorang untuk beralih profesi.

Karman Pamurahardjo adalah salah satu contohnya. Pria yang kini menjabat sebagai **Presiden Direktur Profindo Sekuritas Indonesia**, sekaligus menjabat sebagai **Koordinator Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)**.

Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana Anda bisa sampai mengurus sekuritas?

Saya sebenarnya lulusan S1 teknik elektro dari The University of Auckland, New Zealand, lalu kerja di perusahaan elektro sebagai *production engineer*. Setelah kerja hampir 3 tahun, saya pikir karena kerjanya banyak di lab, jarang ketemu sama orang, saya merasa jadi kuper. Lalu saya coba tempat lain, waktu itu banyak orang-orang *engineering* masuk ke bank, sektor keuangan.

Akhirnya saya kuliah lagi, langsung banting setir ambil jurusan

finance. Setelah lulus, saya langsung masuk sekuritas. Pada sekitar tahun 1995, sekuritas sangat *booming*. Pertama kali, saya sebagai analis di Harita Sekuritas dari Harita Group.

Pada 2004, saya pindah ke Deloitte Konsultan Indonesia. Saya *in charge of corporate finance M&A* untuk Indonesia. Lalu 2008, saya pindah ke Trimegah. Tugas saya pertama sebagai direktur keuangan dan aset manajemen. Pada 2013, saya keluar dari Trimegah dan *joint* di Profindo Sekuritas.

Menurut Anda, bagaimana ketahanan dan prospek pasar modal Indonesia?

Saya melihat sebenarnya pasar modal di Indonesia masih banyak yang bisa kita kembangkan karena penetrasi masyarakat terhadap pasar modal belum terlalu banyak. *Pertama*, mungkin karena literasi yang belum terjangkau ke daerah, meski sekarang sudah digalakkan.

Kedua, mungkin memang waktu dulu itu pasar modal masih belum sedemikian *regulated* sehingga banyak sekali hal-hal yang agak *nyleneh-nyleneh* yang menyebabkan secara *name* agak jelek. Kalau ditanya saat krisis pasar turun, semua negara pasti saat krisis akan turun *even* negara maju kayak AS dan Inggris. Tapi sebenarnya pasar pasti akan balik karena pasar modal itu merupakan salah satu pilar dari ekonomi satu negara. Di sanalah sebenarnya

penghimpunan dana masyarakat untuk modal dilakukan.

Kalau kita lihat, pasar modal Indonesia arahnya jauh lebih baik karena secara regulasi lebih teratur, secara literasi juga masyarakatnya mulai *aware*. Saya rasa literasi sudah meningkat jauh dan ini trennya baik.

Tantangan lainnya?

Level of education. Namanya negara berkembang tidak bisa dibandingkan dengan Singapura dan Hong Kong. Tantangan kita untuk perkenalkan apa itu investasi pasar modal. Tantangan berikutnya adalah pendapatan per kapita yang harus mencapai level tertentu karena kalau kita masih agak rendah biasanya orang masih akan memenuhi sandang pangan dulu.

Saya melihat kita trennya bagus, *very young* demografi. Jadi inilah saatnya untuk memperkenalkan pasar modal. GDP kita juga sudah bergerak di area yang di mana sandang pangan papan seharusnya sudah tercukupi, makanya asuransi mulai bergerak banyak.

Jadi, 10-20 tahun ke depan saya berharap pasar modal kita bisa berkembang secara maksimal.

Soal literasi dan inklusi bagaimana?

APEI banyak mengadakan literasi dan inklusi bersama Bursa dan OJK. Jadi ketika ke daerah itu, kita melihat antusiasmenya luar biasa, mungkin mereka belum mendapatkan





resources yang tepat sehingga masih agak tersendat-sendat. Misalnya, antara Ambon dan Solo itu berasa bobotnya dari sisi kualitas agak beda dari pertanyaan masyarakatnya. Kita berharap daerah-daerah di luar Jawa bisa *catch up* karena mereka sedikit ketinggalan.

Hal lain yang perlu diperbaiki juga adalah sinkronisasi antara literasi dan inklusi. Banyak sekali literasi belum *nyampe* tapi inklusi sudah di sana. Bagi orang yang investasi tapi tidak *ngerti*, pada saat *going bad* misal bodong dan segala macamnya, itu akan jadi *bad name* buat dunia investasi. Makanya harus sesuai dan sinkron antara inklusi dan literasi. Baiknya literasi dulu baru inklusi.

Apakah regulator mendukung pengembangan pasar modal?

Dukungan dari OJK maupun BEI banyak sekali. *Event-event* mereka buat, inisiatif ke asosiasi, *sharing* hal-hal baru ke Anggota Bursa (AB). Itu mereka sangat giat. Kita menyambut baik. Tentu ke depan kita berharap ini bisa diteruskan dan bisa lebih baik lagi supaya pasar modal kita ini muternya lebih cepat, jangan di situ-situ saja. Dari sisi aturan sebenarnya saya mengerti bahwa OJK mempunyai kaca mata di mana mereka harus mengeluarkan peraturan agar pasar modal lebih tertib. Banyak dari aturan mereka yang dikeluarkan sudah disosialisasikan. Jadi kadang-kadang

dirasa memang agak ketat, Kita dari asosiasi bisa memaklumi kalau dari sisi regulator itu menjaga supaya pasar ini tidak mempunyai *bad name*.

Bagaimana menyikapi kebijakan simplifikasi pendaftaran rekening efek?

Simplifikasi ini sebenarnya inisiatifnya bagus sekali karena salah satu *issue* selama ini adalah pembukaan rekening. Orang bukanya aja ribet, terus lama lagi, gimana mau investasi? Jadi inisiatif ini baik sekali dan saya rasa, semua anggota bursa *happy* dengan ini.

Akan tetapi ada satu hal yang agak mengganjal, yakni pembukaan rekening Rekening Dana Nasabah (RDN), di mana masih harus tanda tangan basah, tapi BCA sudah punya terobosan di mana kalau dia sudah buka rekening bank di BCA, tidak perlu lagi buka RDN, jadi otomatis.

Itu saya pikir satu terobosan terlebih pembukaan rekening di BCA juga bisa pakai *mobile*. Jadi itu sudah jauh selangkah di depan. *Breakthrough-breakthrough* seperti ini perlu dilakukan, toh kita sudah zaman IT digital. Diharapkan ini nanti akan meningkatkan pembukaan rekening di luar Jawa.

Bagaimana persaingan antar perusahaan efek?

Kita sebenarnya bersaing secara ketat tapi juga sedikit berteman. Jadi artinya kita juga membutuhkan

perusahaan sekuritas lain sebagai teman, misal kalau *IPO* kita kerja bareng, tapi juga bersaing dalam hal kalau kita bisa sendiri.

Jadi *issue*-nya sebenarnya adalah pasarnya tidak berkembang cukup besar, itu yang menyebabkan kita kadang-kadang persaingan agak ketat sampai istilahnya kurang *gentle*. Perang tarif itu salah satunya. tapi perang tarif pun juga terjadi di luar negeri. cuma kalau pasarnya cukup besar ini bisa dihindari atau diminimalkan.

Kita sebenarnya potensinya cukup besar tapi pasarnya yang tidak besar.

Isu lain adalah *talent* di pasar modal agak susah. Jadi mau cari *talent* itu sebuah tantangan. Jadi *human resources* ini jadi tantangan buat kita supaya pasar ini bisa menarik *young generation*.

Terkait target emiten baru sebanyak 75 emiten?

Kalau yang faktor politik semestinya sudah selesai dan tidak terlalu banyak pengaruhnya. Untuk faktor dari luar, memang akan ada berpengaruh ke perekonomian Indonesia, tapi kita sebenarnya 60%-70% domestik konsumsi, akan terpengaruh mata uang sedikit.

Kita juga ngobrol dengan teman-teman tentang *pipeline* dan kelihatannya tidak akan banyak mundur. Jadi target 75 emiten baru itu *optimistic target* dan kita harus optimis untuk mencapainya. ●

Sumber Pendanaan *Multifinance*

Makin Optimistis Setelah *Asset Registry* Meluncur

Industri *multifinance* di dalam negeri optimistis bahwa faktor pertumbuhan ekonomi yang diyakini lebih baik pada tahun ini akan memengaruhi kelancaran pendanaan. Bahkan, diperkirakan faktor ekonomi tersebut bakal diikuti dengan kepercayaan dari perbankan sebagai salah satu sumber utama pendanaan perusahaan *multifinance*.

Menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, asosiasi yang menaungi industri *multifinance* ini telah menyiapkan sistem *asset registry* sebagai upaya untuk memitigasi risiko. “Kami tunggu pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi, kalau pertumbuhan ekonomi di atas 6% maka pembiayaan akan lebih baik,” kata Suwandi, Rabu (24/4/2019).

Sistem *asset registry* merupakan pusat data aset *multifinance*. Sistem yang dibangun dengan investasi senilai Rp2 miliar tersebut mencakup antara lain berupa nomor rangka,

nomor mesin, nomor sasis, dan nomor plat kendaraan bermotor yang menjadi agunan. “Memang mau tidak mau ada tambahan ongkos untuk *asset registry*. Namun harapannya, industri semakin terjaga,” ujar Suwandi sebelumnya.

Hal itu sebagai jawaban atas problema yang dialami oleh industri *multifinance* pada tahun-tahun terakhir, ketika likuiditas perbankan mengetat seiring dengan terjadinya kasus pelanggaran seperti *double financing* yang dilakukan sejumlah perusahaan, sehingga berimbas pada bisnis penyaluran pembiayaan.

Perbankan sendiri menjadi sumber utama pendanaan *multifinance*, dengan kontribusi mencapai lebih dari 70% dari total pendanaan. Seiring dengan ketatnya likuiditas dari perbankan dalam negeri, sumber pendanaan dari luar negeri justru bertumbuh hingga dua digit.

Jika mengacu data Otoritas Jasa Keuangan, pendanaan yang diterima

industri pembiayaan hingga Februari 2019 mencapai Rp274,30 triliun, tumbuh 4,12% secara tahunan.

Pertumbuhan terbesar justru disokong oleh pendanaan *offshore* senilai Rp104,78 triliun, meningkat 16,76% secara *year on year (yoy)*. Sementara pendanaan dalam negeri justru turun 2,4% (*yoy*) menjadi Rp169,52 triliun.

“Kalau dari luar negeri selalu positif. Dengan ketatnya pendanaan dalam negeri, banyak perusahaan dapat pendanaan luar negeri. Namun tidak semua perusahaan bisa mendapatkan pinjaman dari luar negeri,” jelas Suwandi.

Menurut dia, biasanya perusahaan yang mampu mendapatkan pinjaman dari luar negeri terdiri dari perusahaan yang memiliki aset di atas Rp5 triliun dan sudah pernah mendapat pinjaman asing.

Sebagai contoh, PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance). Perusahaan *multifinance* yang dipimpin oleh Suwandi





Sistem *asset registry* merupakan pusat data aset *multifinance*. Sistem yang dibangun dengan investasi senilai Rp2 miliar tersebut mencakup antara lain berupa nomor rangka, nomor mesin, nomor sasis, dan nomor plat kendaraan bermotor yang menjadi agunan.

berdampak ke emisi surat utang untuk sumber pendanaan mereka,” katanya, Rabu (15/5/2019).

Modal Terbatas

Sementara itu, khusus bagi perusahaan *multifinance* dengan modal yang masih terbatas, Suwandi berharap kehadiran instrumen *asset registry* pada awal tahun ini bakal memompa kembali kepercayaan perbankan, sehingga aktivitas pendanaan akan meningkat dan bisnis pun bertumbuh.

Menurut Suwandi, saat ini sudah ada hampir 80 perusahaan yang mendaftar sebagai anggota *asset registry*. Pihaknya berharap, kepercayaan perbankan kepada industri *multifinance* akan kembali meningkat setelah ditandatangani perjanjian kerja sama dengan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas). “Harapan kami, kita tidak mendengar banyak perusahaan *multifinance* dicabut izinnya lagi,” katanya.

Otoritas Jasa Keuangan sendiri mewajibkan perusahaan pembiayaan atau *multifinance* memiliki fungsi *antifraud* untuk mengembalikan kepercayaan pasar kepada industri tersebut.

Bambang W. Setiawan, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK, mengakui memang banyak *multifinance* yang mengalami kesulitan mendapatkan kucuran pinjaman dari bank untuk sumber pendanaan.

Menurut dia, dari sekitar 185 *multifinance*, ada sekitar 30%-40% pelaku industri yang kesulitan pendanaan. Mereka umumnya merupakan *multifinance* yang tidak terafiliasi atau menginduk kepada bank.

“Tetapi, ada juga *multifinance* yang tidak terafiliasi masih dapat pinjaman dari bank. Berarti *owner*-nya mampu menjaga reputasi kepada bank. Punya sejarah bagus, dikenal, tidak pernah ada isu aneh-aneh, isu *fraud*, dan lain-lain. Jadi kalau mau dipercaya, mari perbaiki diri,” ujarnya Kamis (21/2/2019). ●

sebagai direktur utama itu akan merealisasikan pinjaman sindikasi senilai US\$75 juta pada akhir April 2019. Rencananya, perjanjian sindikasi tersebut berasal dari ANZ, Standard Chartered, OCBC Singapura, Bank Mandiri Singapura, dan CIMB Singapura.

Kemudian, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk., (Adira Finance) yang menerima pinjaman sindikasi senilai US\$350 juta dari Singapura, Taiwan, dan Jepang. Sindikasi perbankan asing kali ini melibatkan BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Maybank Grup, MUFG Bank, Ltd., dan United Overseas Bank Limited. sebagai *mandated lead arrangers* dan *bookrunners*.

Di sisi lain, penerbitan surat utang juga menjadi alternatif sumber pendanaan perusahaan *multifinance*, di tengah ketatnya likuiditas dari perbankan.

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terdapat 10 perusahaan pembiayaan yang telah menerbitkan surat utang secara nasional dengan total nilai

Rp18,02 triliun atau sekitar 49,48% dari total penerbitan surat utang.

Adapun *bond* sektor pembiayaan masih mendominasi sekitar 86,36% atau Rp15,56 triliun dari total penerbitan surat utang sektor pembiayaan. Sisanya, yakni Rp843,5 miliar atau 4,68% dari MTN dan Rp1,61 triliun atau 8,93% dari sukuk.

Pada 2018, total penerbitan surat utang dari 23 perusahaan pembiayaan senilai Rp41,82 triliun. Masing-masing kontribusi obligasi, MTN, sukuk, dan sekuritisasi yakni 78,60% dari obligasi, 12,03% dari MTN, 4,99% dari suku, dan sisanya sekuritisasi.

Head Division Financial Institution Ratings PT Pefindo Hendro Utomo menilai, dengan banyaknya surat utang jatuh tempo pada kuartal II/2019, masih banyak juga perusahaan yang membutuhkan pendanaan baru lewat surat utang.

“Banyak *multifinance* yang masuk ke *consumer finance* seperti kendaraan bermotor maka berpengaruh ke permintaan pembiayaan. Ujung-ujungnya

Menyiasati Pengetatan Likuiditas

Pertumbuhan kredit perbankan dalam beberapa tahun terakhir lebih kencang dibandingkan dengan penghimpunan dana perbankan. Hal itu membuat distorsi kebutuhan dana sehingga terjadi segmentasi. Hal itu diperparah dengan kenaikan suku bunga acuan pada tahun lalu hingga mencapai 175 basis poin menjadi 6%. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kondisi likuiditas perbankan, redaksi mewawancarai **Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Anggoro Eko Cahyo**. Berikut petikannya:

Kenapa pertumbuhan dana perbankan cenderung melambat dibandingkan dengan kredit dalam beberapa tahun terakhir?

Saya sih berpikir kalau dari sisi konsumen. Sekarang ada bagusnya karena konsumen sudah berani investasi tidak hanya di perbankan, tetapi juga kalau kita lihat *mortgage*. Sehingga dana masyarakat tidak hanya disimpan di bank.

Kalau dulu kita melihat perumahan lambat, *wait and see*. Tahun lalu tumbuhnya *mortgage* sudah 9%, dan orang sudah berani pakai tabungannya

bayar *Down Payment* (DP). Itu menurut saya kenapa likuiditas tidak kencang pertumbuhannya.

Mereka [nasabah] sudah mau investasi, dan kita melihat mereka sudah mulai punya opsi. Selain mereka menyimpan dana di bank juga semakin banyak instrument investasi dan perintah juga menerbitkan surat berharga.

Kalau di bank-bank besar tidak terlalu terasa karena tabungan kita juga naik. Tetapi akhirnya mereka realistis pertarungan di bank - bank Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) I dan II menjadi lebih ketat.

Perlambatan pertumbuhan likuiditas bukan karena pembiayaan infrastruktur yang bertenor panjang?

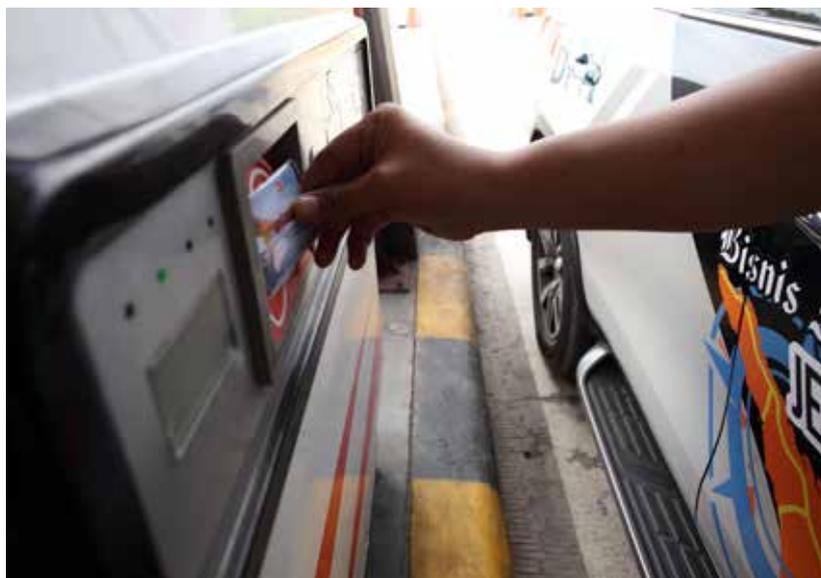
Kalau dibilang, saya melihatnya tidak langsung dari infrastruktur. Saya tidak melihatnya berdampak dari situ langsung. Karena konsumsinya mulai membaik dan kita lihat GDP tahun lalu cukup lebih baik didorong oleh konsumsi.

Bagaimana BNI sendiri memenuhi kebutuhan likuiditas?

Kalau kita melihat likuiditas kita ketat. Industri juga sampai 95% [rasio intermediasi]. Saya melihat bank-bank pesaing juga ada di angka-angka itu. Kita ada di 90%-an. Tahun lalu 88%-an. kemungkinan dampaknya adalah peningkatan *cost of fund* karena perebutan makin kencang.

Ya tahun lalu kami masih bisa jaga di level itu [88%], tapi tahun ini kami ada kemungkinan akan naik karena perebutan likuiditas.

Kalau kami akan menjaga *Current Account Saving Account* (CASA). Saat ini CASA kami berada di 64,8%. Nah tahun ini strategi untuk jaga CASA juga di lakukan. Apalagi CASA terbesar kami dari giro, baru tabungan. Kalau giro memang, *cash management* kami





Untuk konsumen, kami mendorong untuk transaksi lebih sering. Jadi kami butuh digitalisasi lah. Artinya kemampuan IOT harus ditingkatkan, transaksinya, dan pengalaman juga diperbaiki.

makin lama makin baik sih, karena klien kami *corporate*.

Untuk konsumen, kami mendorong untuk transaksi lebih sering. Jadi kami butuh digitalisasi lah. Artinya kemampuan IOT harus ditingkatkan, transaksinya, dan pengalaman juga diperbaiki.

Maka tahun lalu layanan kami dari *mobile banking* meningkat hampir dua kali lipat. Hampir 117% meningkat kenaikan *user*, dan penggunaan juga hampir sama dua kali lipat.

Itu baiknya buat kami, memang nantinya kami akan dorong semua orang akan ke *mobile banking*, karena tentunya mereka diedukasi oleh *fintech*. Nah itu yang mendorong internal kita untuk berkembang, di IT khususnya.

Selanjutnya apa yang dikembangkan?

Dalam waktu dekat kami juga bisa buka rekening secara *mobile*. Jadi tidak perlu melalui cabang. Nanti bakal ada *e-banking* untuk verifikasinya. Memang peraturan OJK sudah mengizinkan pada 2018. Selanjutnya bagaimana kami mempermudah transaksi pembukaan rekening. Intinya semudah kita menggunakan aplikasi *fintech*-lah.

Kemudian apakah ada pemenuhan dana secara nonkonvensional?

Kami memang punya rencana, tetapi memang kami pertimbangkan juga. Bisa berupa *Medium Term Note (MTN)*, dan *Negotiable Certificate Deposit*

(NCD), tetapi tergantung lah sesuai kebutuhan kami. Kami harus melihat sampai kuartal II.

Artinya kalau dari sisi dana pihak ketiga kami tidak ada masalah, dan itu alternatif terakhir [pencarian dana nonkonvensional]. Contohnya tahun kemarin kami mendapatkan izin prinsip sampai dengan Rp9 triliun, tapi tidak kami *utilize* semuanya, cuma sekitar Rp3 triliun saja pada saat itu. Karena memang kami masih belum butuh. Kebetulan DPK kita masih besar.

Kalau rencana tahun ini berapa dana nonkonvensional?

Kalaupun menggunakan [menerbitkan] tidak akan jauh beda dengan tahun lalu. Paling hanya melanjutkan *utilize* yang sisa lama sih. Jadi kami masih punya sisa sekitar Rp6 triliun. Karena sumber lain seperti valas itu bisa *leverage* kebutuhan kita untuk kasih pinjaman. ●

Asuransi Barang Milik Negara (ABMN)

Konsorsium Mulai Lakukan *Piloting*

Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (ABMN), yang dibentuk berdasarkan instruksi Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun lalu, segera melakukan proyek percontohan atau *piloting* terhadap aset milik negara.

Untuk tahap *piloting*, konsorsium yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap aset-aset milik negara dari potensi bencana alam, akan menangani aset Kementerian Keuangan senilai Rp11,4 triliun pada tahun ini.

Selanjutnya, pada 2021, Konsorsium ABMN ditargetkan dapat memproteksi seluruh aset negara dengan total nilai mencapai Rp4,2 triliun.

Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Trinita Situmeang menjelaskan, konsorsium tersebut akan mempersiapkan program asuransi dan anggota konsorsium akan bertindak menjadi penanggung risiko. “[Konsorsium] itu nanti yang mempersiapkan program asuransinya, kemudian mengkomunikasikan kepada Dirjen Kekayaan Negara seperti apa mekanismenya, dan bagaimana merespon terhadap kerugiannya.

Anggota konsorsium ini yang akan menjadi *risk barrier*, penanggung risikonya,” ujar Trinita, Senin (23/04/2019).

Konsorsium tersebut dibentuk oleh pemerintah bersama AAUI sejak tahun lalu. Urgensi pembentukan konsorsium tersebut dinilai semakin besar setelah Indonesia dilanda tiga bencana besar pada semester II/2018, yakni gempa bumi di Lombok – Nusa Tenggara Barat, kemudian gempa bumi dan tsunami serta likuifaksi

di Palu – Sulawesi Tengah, serta tsunami di Banten.

Menurut Trinita, rangkaian bencana tersebut semakin mendorong pemerintah untuk meningkatkan proteksi terhadap aset-aset negara. Kendati demikian, sejak 2 tahun sebelumnya, yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 245/PMK.06/2016, pemerintah telah mengatur tentang pengasuransian barang milik negara diatur.

Objek-objek barang milik negara yang dapat diasuransikan diatur dalam pasal 7 PMK tersebut. Pasal itu menyebutkan, barang milik negara yang dapat diasuransikan adalah gedung dan bangunan, jembatan, alat angkutan darat/apung/udara bermotor dan barang negara yang ditetapkan oleh pengelola barang.

Ada sejumlah kriteria bahwa barang tersebut dapat diasuransikan, yakni berlokasi di daerah rawan bencana alam, mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang, dan menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Jika mengacu data Konsorsium ABMN, terdapat Rp4,2 triliun aset milik negara yang dapat diproteksi hingga 2021 dan jika dipaparkan, aset-aset tersebut a.l. aset milik Kementerian PUPR senilai Rp1,27 triliun, aset Kementerian Pertahanan Rp826,46 miliar, aset Kementerian Sekretariat Negara Rp376,61 miliar, aset Kementerian Perhubungan Rp321,18 miliar, aset Kementerian Riset dan Dikti Rp288,44 miliar, aset Kepolisian Rp260,15 miliar, aset Kementerian Keuangan Rp110,64 miliar, aset Kementerian Kesehatan Rp91,71 miliar, aset Kementerian Agama Rp78,20 miliar, aset Kementerian Pertanian Rp53,93 miliar, dan kementerian lainnya Rp525,79 miliar.

Adapun jenis-jenis aset yang dapat diproteksi a.l. mencakup aset tanah senilai Rp2,77 triliun, aset jalan, irigasi dan jaringan Rp400,66 miliar,



Objek-objek barang milik negara yang dapat diasuransikan diatur dalam pasal 7 PMK tersebut. Pasal itu menyebutkan, barang milik negara yang dapat diasuransikan adalah gedung dan bangunan, jembatan, alat angkutan darat/apung/udara bermotor dan barang negara yang ditetapkan oleh pengelola barang.

gedung dan bangunan Rp 269,88 miliar, peralatan dan mesin Rp131,96 miliar, konstruksi dalam pengerjaan Rp124,33 miliar, alat angkut darat/apung/udara bermotor Rp99,72 miliar, persediaan Rp91,09 miliar, jembatan Rp75,15 miliar, aset tetap lainnya Rp46,93 miliar, serta aset lainnya Rp190,29 miliar.

Menurut Trinita, dari 83 anggota AAUI, sebanyak 64 perusahaan asuransi umum dan reasuransi telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota konsorsium. Angka tersebut berpotensi bertambah di kemudian hari. Setiap perusahaan yang mendaftar ke dalam konsorsium tersebut telah menyampaikan pretensinya masing-masing kepada AAUI.

Indra Baruna, Presiden Direktur PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (Tugu Insurance) mengkonfirmasi keikutsertaan perusahaan asuransi umum tersebut ke dalam Konsorsium ABMN. “Dapat kami konfirmasi bahwa Tugu Insurance turut serta mendaftar dalam Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (ABMN),” ujar Indra Rabu (24/04/2019).

Namun, Indra menyampaikan pihaknya belum bisa memberikan keterangan berapa pretensi yang dilaporkan Tugu Insurance.

Bagi industri asuransi, program ABMN diyakini bakal mendorong perolehan premi dari lini bisnis property, tapi potensi penambahan premi belum diketahui karena tarif premi masih dibahas. ●

Tip Berinvestasi di *Fintech Lending*

Ekspansi industri teknologi finansial, khususnya di bidang pinjaman langsung tunai atau *Peer to Peer (P2P) lending*, telah menjangkit sekitar 272.548 investor atau pemberi pinjaman hingga Maret 2019. Jumlah itu bertumbuh 31,34% (*year to date/ytd*) dibandingkan dengan jumlah pemberi pinjaman atau lender pada Desember 2018, yang tercatat sebanyak 207.507 lender.

Dari sisi jumlah transaksi, tercatat kenaikan sebesar 78,22% (*ytd*) dari 8,79 juta akumulasi transaksi pada Desember 2018 menjadi 15,66 juta pada Maret 2019.

Hal itu seiring dengan kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan dari Rp22,66 triliun pada Desember 2018 menjadi Rp33,20 triliun pada Maret 2019, atau bertumbuh sebesar 46,48%.

Angka-angka tersebut semakin membuka mata bahwa *platform P2P lending* merupakan salah satu tren baru dalam berinvestasi.

Adrian Gunadi, Ketua Umum Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebutkan kehadiran *P2P lending* dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang menjanjikan, di tengah beragam jenis instrumen saat ini.

Dari sisi profil risiko, lanjutnya, investasi melalui *P2P lending* berada

di antara obligasi dan saham. Namun, menurut dia, investasi melalui *P2P lending* relatif lebih terukur. “Karena di dalam kontrak ada *fix rate* dari peminjaman itu. Kita [*lender*] bisa mengukur itu. Tetapi orang yang memang investasi di tekfin *lending* itu adalah orang yang sudah tahu risikonya,” ujarnya, Selasa (14/5/2019).

Di sisi lain, dia juga menyebutkan sejumlah platform tekfin *lending* yang menawarkan ragam jenis investasi. “Contohnya Investree, yang menawarkan SBR dan reksa dana juga. Kalau saya jadi *lender*, saya punya beberapa macam alternatif, ada pinjaman, ada obligasi, ada reksa dana. *Lender* bisa atur sendiri portofolionya,” katanya.

Namun, pihaknya tetap meminta masyarakat agar selektif ketika hendak berinvestasi melalui platform *P2P lending*. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak temuan tekfin ilegal oleh Satgas Waspada Investasi.

Tekfin-tekfin itu tersebar luas dan dapat ditemukan dengan mudah saat berselancar di dunia maya, baik lewat toko aplikasi maupun sosial media. Tidak memiliki kejelasan identitas badan usaha, tetapi tawarannya menggiurkan.

Adrian menyampaikan beberapa tip untuk menyeleksi *platform*

tekfin yang akan digunakan sebagai *channel* berinvestasi. *Pertama* dan paling penting, cek legalitas platform tersebut melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan AFPI.

Selanjutnya, calon investor atau *lender* juga dapat mengecek tingkat keberhasilan pengembalian 90 hari (TKB) *platform* tekfin *lending* tersebut. “OJK sudah mewajibkan setiap platform untuk menampilkan berapa TKB-nya, di *website*-nya. Jadi sebagai *lender*, bisa melihat tingkat *confidence*-nya [dalam berinvestasi].”

Sampai dengan 28 April 2019, Satgas Waspada Investasi kembali menjangkit 144 entitas yang melakukan kegiatan usaha tekfin *lending*, tetapi tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

Temuan itu pun semakin menambah panjang daftar tekfin *lending* tidak berizin. Pada 2019 saja, sampai dengan Mei, Satgas sudah menemukan sebanyak 543 entitas tekfin *lending* ilegal.

Sementara itu, sepanjang 2018 ditemukan sebanyak 404 entitas ilegal. Artinya sampai dengan saat ini, Satgas telah menangani hampir 1.000 entitas tekfin *lending* ilegal.

Jumlah itu jauh melampaui jumlah tekfin *lending* yang berizin dan terdaftar, serta selalu diawasi oleh OJK. Sebagai catatan, sampai dengan Mei 2019 terdapat 113 usaha tekfin *lending* yang telah terdaftar/berizin di OJK. Terdiri dari 107 tekfin *lending* konvensional dan enam tekfin *lending* dengan prinsip syariah.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing berkali-kali mengingatkan masyarakat agar waspada saat hendak melakukan transaksi melalui *platform P2P lending*. “Cek legalitas dan rasionalitasnya,” tegasnya, Selasa (7/5/2019). ●



Menjaga Kualitas Kredit Lewat Data

Indonesia mulai memiliki Sistem Informasi Debitur (SID) sejak 2007. Tepatnya pada 30 November 2007 sejak disahkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

SID adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh BI. Sistem ini lahir dari pelajaran krisis 1998 ketika bank menyalurkan kredit tidak memiliki data detail mengenai calon debitur.

Satu sisi tujuan dari penyelenggaraan SID untuk mempercepat proses penyaluran kredit, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.

Sejak 1 Januari 2018, layanan SID, yang biasa dikenal sebagai BI *Checking*, beralih pengelolaan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan ini berkaitan dengan mulai diaplikasikannya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dengan berjalannya SLIK, BI tidak lagi melayani kegiatan operasional SID atau BI *Checking* sejak 31 Desember 2017. Pelapor SID ataupun masyarakat yang ingin melakukan pengecekan BI *Checking* dapat melakukannya di OJK.

OJK sebenarnya sudah mulai mengaplikasikan SLIK sejak April 2017. Namun, pengaplikasian dilakukan secara bertahap. Hingga akhirnya per 1 Januari 2018, SLIK benar-benar digunakan secara luas.

Adanya SLIK yang menggantikan SID atau BI *Checking* bertujuan untuk memperluas akses terhadap IDI Historis. Semula akses terhadap IDI Historis atau BI *Checking* terbatas pada lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan.

Dengan adanya SLIK, tidak hanya bank dan lembaga pembiayaan yang punya akses, kini lembaga keuangan nonbank punya akses ke IDI Historis dan kewajiban melaporkan data debitur ke SID.

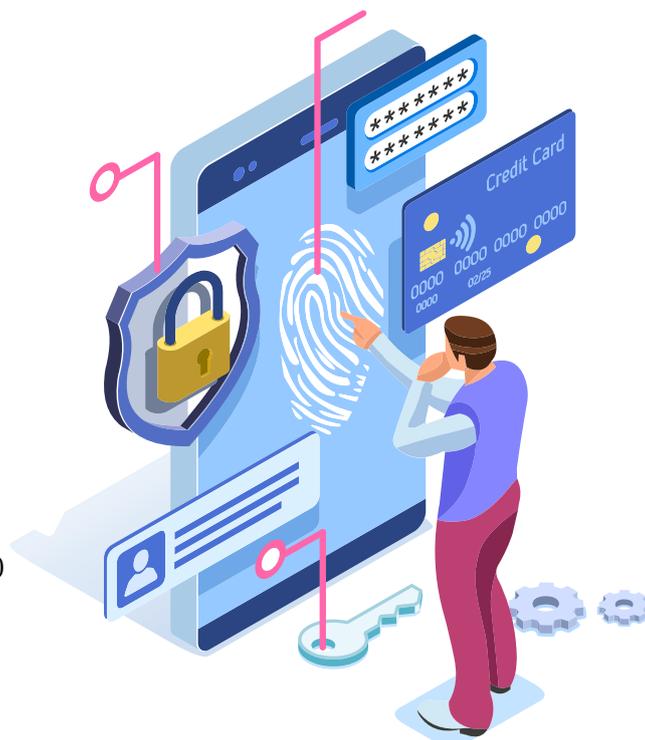
Angka kredit bermasalah (*Non Performing Loan/ NPL*) diharapkan bisa diminimalkan dengan diterapkannya SLIK. Dengan SLIK, OJK bersama BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saling terhubung karena diaplikasikannya SLIK.

Ketiga lembaga tersebut pun nantinya dapat saling bertukar dan mengakses informasi mulai dari informasi bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang disusun BI, LPS, dan OJK serta informasi lainnya.

Apa Kelebihan SLIK OJK? Karena SLIK bertujuan memperluas layanan SID, data yang tercatat melalui SLIK, baik data peserta maupun debitur, lebih besar dari segi jumlah. Sebab cakupan pesertanya menjangkau hingga lembaga keuangan nonbank, bahkan pegadaian. Inilah yang menjadi salah satu kelebihan SLIK ketimbang SID.

Selain itu, data yang masuk ke SLIK jadi lebih rinci karena masuknya data utilitas, seperti tagihan air ataupun listrik.

Bahkan, saat ini pengelolaan data debitur juga dibuka bagi pihak swasta atau disebut Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP). Saat ini sudah ada dua LPIP, yakni Pefindo Biro Kredit dan Kredit Biro Indonesia Jaya.



Menurut informasi Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK Iرنal Fiscallutfi, akan ada LPIP baru mendaftar ke otoritas. “Kalau yang tertarik jadi LPIP banyak, tetapi kami baru berikan satu izin prinsip lagi kepada salah satu perusahaan, dan mereka tinggal urus izin operasional,” katanya usai seminar biro kredit, Rabu (24/4/2019).

Iرنal memaparkan, jumlah data debitur yang dilaporkan SLIK per Maret 2019 adalah 64 juta dengan jumlah fasilitas sebanyak 144 juta rekening. Dia juga mengatakan jumlah tersebut sudah lebih baik dari periode sama tahun lalu.

Dengan demikian, akan semakin banyak lagi data yang dapat diolah untuk dijadikan patokan bagi pelaku industri untuk dapat menyalurkan kredit atau produk pembiayaan lainnya. ●

Mengenal Jenis Indeks Saham

Dalam berinvestasi di pasar saham, investor pada dasarnya memiliki banyak pilihan indeks yang bisa digunakan sebagai acuan perdagangan. Indeks saham dibentuk berdasarkan ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan digunakan sebagai sarana tujuan investasi.

Selain sebagai acuan investasi bagi investor reksa dana, keberadaan indeks saham juga sangat membantu investor dalam memilih saham-saham yang hendak dikoleksi. Pasalnya, untuk jenis indeks tertentu, telah melakukan seleksi ketat terhadap saham-saham berdasarkan ukuran kapitalisasi pasar dan likuiditasnya.

Saat ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki 22 jenis indeks saham. Ke-22 indeks tersebut dibedakan berdasarkan kriteria tertentu. *Pertama*, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di BEI.

Kedua, indeks yang mengukur performa harga dari saham-saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik, seperti Indeks LQ45, Indeks IDX30, Indeks IDX80, Indeks Kompas100, Indeks Bisnis 27, Indeks Investor33, dan Indeks MNC36. Indeks-indeks ini diterbitkan dan dikelola pihak ketiga di luar BEI.

Ketiga, indeks yang mengukur performa harga dari saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah seperti Indeks IDX SMC Composite, Indeks IDX SMC Liquid, dan Indeks Pefindo25.

Keempat, indeks yang mengukur performa harga saham yang dinyatakan sebagai saham syariah sesuai dengan Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh OJK yakni Indeks Saham Syariah

Indonesia (ISSI), *Jakarta Islamic Index* (JII), dan *Jakarta Islamic Index 70* (JII70).

Kelima, indeks yang mengukur performa harga seluruh saham dari masing-masing sektor industri yang terdapat pada klasifikasi *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) antara lain. Indeks Pertanian; Indeks Pertambangan; Indeks Keuangan; Indeks Manufaktur; Indeks Aneka Industri; Indeks Industri Barang Konsumsi; Indeks Industri Dasar dan Kimia; Indeks Properti, Real

Selain sebagai acuan investasi bagi investor reksa dana, keberadaan indeks saham juga sangat membantu investor dalam memilih saham-saham yang hendak dikoleksi.

Estat, dan Konstruksi Bangunan; Indeks Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi; dan Indeks Perdagangan, Jasa, dan Investasi.

Keenam, indeks yang mengukur performa harga seluruh saham tercatat sesuai dengan papan pencatatannya, yakni Indeks Papan Utama (*Main Board Index*) dan Indeks Papan Pengembangan (*Development Board Index*).

Ketujuh, indeks yang mengukur performa harga saham dari emiten yang memiliki kinerja yang baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik (*Sustainable and Responsible Investment*), yakni Indeks SRI KEHATI. Indeks ini diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI).

Kedelapan, indeks yang mengukur performa harga dari saham-saham yang membagikan dividen tunai selama tiga tahun terakhir dan memiliki *dividend yield* tinggi yakni Indeks IDX High Dividend 20. *Kesembilan*, indeks yang mengukur performa harga atas saham-saham perusahaan BUMN, BUMD, dan afiliasinya yakni Indeks IDX BUMN 20.

Kesepuluh, indeks yang mengukur performa dari 15 saham perbankan yang memiliki fundamental dan likuiditas yang baik yakni Indeks Infobank15. *Kesebelas*, indeks

yang terdiri dari 18 saham yang konstituennya dipilih dari sektor-sektor infrastruktur, penunjang infrastruktur, dan pembiayaan infrastruktur yakni Indeks SMinfra 18.

Kesebelas, indeks yang mengukur performa harga dari 30 saham emiten-emiten yang memiliki peringkat *investment grade* dari PEFINDO (idAAA hingga idBBB-) yang berkapitalisasi pasar paling besar yakni Indeks PEFINDO i-Grade.

Namun demikian, terkait dengan semua indeks tersebut, BEI memberikan catatan *disclaimer*, yakni BEI tidak bertanggung jawab atas produk yang diterbitkan oleh pengguna yang mempergunakan indeks-indeks di BEI sebagai acuan (*benchmark*). BEI juga tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas keputusan investasi yang dilakukan oleh siapapun pihak yang menggunakan indeks-indeks di BEI sebagai acuan. ●

TIPS

Meminjam di *Fintech Lending* Sesuai Kebutuhan & Kemampuan Membayar

Begitu banyak hal-hal yang "dibunuh" oleh teknologi, hal-hal ini tergantikan dan terbarukan semata-mata untuk kemudahan dan membuat segalanya menjadi lebih efisien. Contohnya, dulu jika ingin makan sesuatu kita harus datang ke restoran atau tempat makannya. Namun kini, hanya perlu *scroll* dan beberapa klik di *handphone*, maka makanan diantar.

Bahkan, kini kita juga *gak perlu* repot-repot mengeluarkan uang tunai dan menunggu kurir mencari-cari uang kembalian, karena cara membayarnya sudah pakai dompet elektronik. Contoh lainnya, dulu kalau ingin meminjam uang kita harus ke bank yang prosesnya sangat panjang dan jika pinjam uang ke teman atau saudara harus tahan malu dan belum tentu dikasih juga.

Dengan perkembangan teknologi yang super cepat, sekarang Sobat Sikapi bisa meminjam uang dengan sistem

daring (*online*) atau *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* atau *Fintech Lending*. Persyaratan yang harus dipenuhi pun sangat mudah dan uang bisa cair dengan cepat.

Layanan pinjaman daring (*pindar*) ini dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia dan membuka akses bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan atau lembaga pendanaan lainnya.

Bagai dua sisi mata uang, di satu sisi *fintech lending* ini dibuat untuk memudahkan konsumen

dalam pendanaan untuk memenuhi kebutuhannya atau mengembangkan usahanya. Disisi lainnya, semakin mudahnya mendapat pinjaman dana, terkadang kita terlena untuk sering meminjam tanpa memperhitungkan kemampuan kita dalam melunasi pinjaman, dan lebih berbahaya lagi terkadang pinjaman dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Agar tidak menyesal dan kehilangan banyak hal kedepannya perhatikan beberapa poin berikut sebelum melakukan pinjaman dengan sistem *online*:

1. Pinjam di perusahaan terdaftar/berizin di OJK.

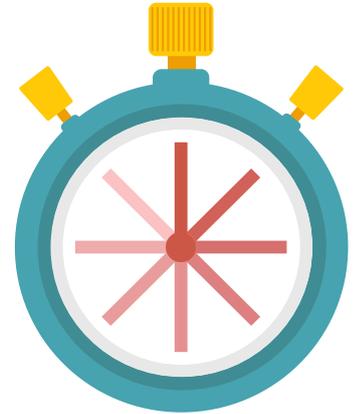
Sampai kini ada ratusan *fintech lending* yang menawarkan pinjaman dana mudah dan cepat, tapi kenyataannya hingga April 2019, baru ada 106 perusahaan *fintech lending* yang terdaftar/berizin di OJK. Pastikan Sobat hanya melakukan pinjaman di perusahaan yang telah terdaftar/berizin di OJK karena dengan begitu proses bisnis dan produk kredit *fintech* telah diverifikasi dan mendapatkan pengawasan dari OJK. Cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman melalui telepon Kontak OJK 157 atau di *website* OJK (www.ojk.go.id).





2. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Dengan kemudahan yang diberikan dalam mendapatkan dana pinjaman, jangan sampai Sobat terlena dan meminjam lebih dari yang dibutuhkan. Hitungannya, total pinjaman yang diperbolehkan adalah maksimal 30% dari total penghasilan. Jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif agar tidak memberatkan dan jangan lupa pertimbangkan cicilan lain yang harus dibayarkan. Jangan sampai Sobat malah kesulitan melunasi tagihan-tagihan yang ada, *ya!*



3. Lunasi cicilan tepat waktu.

Selalu lunasi cicilan tepat waktu untuk menghindari denda yang membengkak. Agar tidak lupa membayar, pasang pengingat di ponsel atau beri tanda pada kalender di rumah atau di kantor.

4. Hindari gali lubang tutup lubang.

Ini *sih* bahaya banget, jangan membayar pinjaman dengan pinjaman baru untuk menghindari terlilit utang. Cara seperti ini bukannya membuat tagihan cepat lunas, tapi justru menambah banyak tagihan yang bisa jadi makin sulit kita lunasi. Jadikan membayar cicilan sebagai prioritas utama setelah menerima gaji.



5. Ketahui bunga dan denda pinjaman sebelum meminjam.

Gak sedikit yang mengabaikan hal ini dengan alasan “butuh cepat”, padahal bunga dan denda ini akan mempengaruhi jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Pelajari dahulu bunga dan denda yang ditawarkan, lakukan survei ke beberapa perusahaan *fintech lending* sebagai pembandingan sebelum melakukan pinjaman.

6. Pahami kontrak perjanjian.

Baca dengan teliti kontrak perjanjian yang ditawarkan, dan ajukan pertanyaan apabila belum jelas. Jika kita melakukan suatu hal yang melanggar ketentuan, akibatnya adalah sanksi yang menghampiri. Artinya, jika tidak ingin kena masalah jangan sekali-kali melanggar aturan yang ada *ya*, Sobat!



Bandung Edu Fin Run 2019

OJK – Bank Indonesia Tingkatkan Edukasi dan Literasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) lainnya menggelar kegiatan *Bandung Edu Fin Run 2019* pada Minggu, 7 April 2019 sebagai komitmen melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pelayanan konsumen keuangan.

Acara *Bandung Edu Fin Run 2019* melibatkan sekitar 6.000 orang peserta yang berasal dari kalangan masyarakat, karyawan OJK, BI dan perwakilan dari IJK, serta dihadiri jajaran Anggota Dewan Komisiner OJK, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Pimpinan Industri Jasa Keuangan, serta pejabat publik lainnya.

Kegiatan ini juga diadakan dalam rangka menyambut Hari Hak Konsumen Sedunia (*World Consumer Rights Day*) yang jatuh pada 15 Maret dan sebagai bagian dari Hari Konsumen Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 April.

“Aspek perlindungan konsumen itu penting karena dapat memberikan transparansi kepada nasabah, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sektor jasa keuangan, meyakinkan kepada masyarakat bahwa produknya aman, data nasabah dapat terjaga dengan baik, serta memastikan bahwa pelaku industri jasa keuangan tidak melakukan *abuse* terhadap konsumennya,” kata Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya.

Dia menuturkan bahwa OJK senantiasa turut mendukung program BI, khususnya dalam menyediakan sistem pembayaran dengan teknologi pembayaran yang inovatif, efisien, aman



dan mudah digunakan masyarakat salah satunya melalui program *cashless society*, program Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN, dan gerakan nasional non tunai lainnya.

Sejauh ini, OJK dan BI telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan dan pelayanan konsumen. Di antaranya dengan menerbitkan regulasi terkait, mengadakan sosialisasi di sekolah, universitas, serta komunitas untuk lebih mengenal pasar modal, mengajak masyarakat untuk mulai melakukan transaksi pembayaran nontunai, juga sosialisasi mengenai waspada penipuan berkedok investasi yang akhir-akhir ini marak terjadi.

Selain itu, OJK juga telah mengaktifkan Kontak OJK 157 yang siap menampung dan meneruskan keluhan masyarakat pengguna layanan jasa keuangan, dengan harapan proses pengambilan tindakan dalam memberikan perlindungan hak konsumen keuangan dapat dilakukan lebih cepat.

Wimboh berharap melalui sinergi antara OJK dan BI, serta

seluruh pemangku kepentingan di IJK, stabilitas sektor jasa keuangan dapat senantiasa terjaga, dan juga mendukung program-program pemerintah, serta menstimulus ekosistem jasa keuangan, sehingga kehadirannya dapat menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Erwin Rijanto Deputy Gubernur BI menyampaikan bahwa dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen, Bank Indonesia selalu berkoordinasi dengan otoritas terkait seperti OJK dan Pemerintah Daerah maupun dengan pelaku industri jasa keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Diluar itu, lanjutnya, partisipasi aktif dari pengguna jasa sistem pembayaran mutlak sangat diperlukan dalam menjaga hak-hak konsumen.

Untuk itu, sinergi dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pelaku industri ini diharapkan mendorong terciptanya stabilitas perekonomian dengan tetap memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak, terutama dari sisi konsumen. ●



OJK Dorong Inklusi Keuangan di Hari SimPel

Sebagai upaya mempopulerkan tabungan di kalangan pelajar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar kegiatan “Simpanan Pelajar (SimPel) Day 2019” bersama dengan pelaku industri perbankan dan kementerian/lembaga terkait dengan mengusung tema *Mewujudkan Generasi Pelajar Cerdas dan Gemar Menabung* dan *Tagline* “Aku Pelajar, Aku Generasi SimPel”.

Kegiatan “SimPel Day 2019” yang diselenggarakan pada Kamis, 2 Mei 2019 di Jakarta itu diharapkan semakin menumbuhkan budaya menabung bagi pelajar Indonesia dan

meningkatkan inklusi keuangan kaum muda.

Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Indonesia Menabung dan sejalan dengan penerapan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). “Dengan adanya kegiatan SimPel Day diharapkan semakin menumbuhkan budaya menabung bagi pelajar Indonesia serta mendorong terwujudnya kepemilikan rekening bagi seluruh pelajar di Indonesia,” kata Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso.

Sejak diluncurkan pada tahun 2014, program SimPel/SimPel iB saat ini telah diikuti oleh sebanyak 304 bank, yang terdiri dari 20 Bank Umum, 11 Bank Umum Syariah, 24 Bank Pembangunan Daerah dan 249 Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan jumlah rekening hingga akhir tahun 2018 sebanyak 17.007.508 dengan nominal sebesar Rp6,64 triliun.

Wimboh mengatakan, program SimPel diarahkan untuk memberikan edukasi dan inklusi keuangan, serta mendorong budaya menabung sejak dini.

“Simpel kita buat untuk menarik dan mempermudah siswa mulai menabung sehingga melatih mereka mulai mengelola keuangan sejak dini dan merencanakan masa depannya,” katanya.

Hadir dalam acara ini Menko Perekonomian Darmin Nasution dan para pimpinan Industri Jasa Keuangan (IJK), serta sekitar 1.500 pelajar dari perwakilan sekolah di wilayah Jakarta ikut dalam ikrar Aksi Pelajar Indonesia Menabung secara serentak di seluruh Indonesia.

Ikrar tersebut merupakan simbolisasi komitmen dan semangat para pelajar untuk melaksanakan budaya menabung sejak dini serta mendukung Aksi Indonesia Menabung. ●



Goes to Campus Tingkatkan Minat

Generasi Muda Pelajari Masalah Keuangan

Kuliah umum dalam rangka kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Goes to Campus* dan Edu Expo hadir di Politeknik Negeri Ambon pada 25 Februari 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 1.028 orang dengan latar belakang mahasiswa, akademisi dan dosen itu tidak hanya berasal dari Politeknik Negeri Ambon, tapi juga dari perwakilan Universitas Pattimura, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Institut Agama Islam Negeri Ambon, dan Universitas Darussalam.

Turut hadir juga Alim Sutiono selaku Pemimpin Wilayah VI Makassar PT Pegadaian Persero, *Assistant Vice President* Bank Mandiri Satiridia Juliandani, dan beberapa CEO dari perusahaan *Fintech*. Sebagai bagian dari

rangkaian kegiatan itu, terdapat pameran produk/layanan keuangan sebagai partisipasi dari 15 lembaga jasa keuangan di wilayah Ambon yang dikhususkan bagi mahasiswa maupun akademisi, serta tiga *booth* sebagai perwakilan dari OJK, Bank Indonesia dan Akademik Politeknik Negeri Ambon.

Bambang Hermanto, Kepala OJK Provinsi Maluku dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Politeknik Negeri Ambon yang mengizinkan penggunaan fasilitas aula sehingga kegiatan edukasi keuangan berupa kuliah umum Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen berjalan dengan baik.

Kegiatan edukasi yang dilaksanakan pada kesempatan itu

merupakan suatu metode edukasi yang mengkolaborasikan antara kuliah umum, *talkshow*, Edu Expo dan *entertainment* berupa *quiz* dan penampilan pertunjukan *group band* lokal dari kota Ambon. Metode edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat generasi muda, khususnya mahasiswa dan akademisi agar lebih tertarik mempelajari beberapa hal mengenai keuangan dengan lebih mudah dan menyenangkan.

Beberapa *booth* dari lembaga jasa keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan informasi maupun pembukaan rekening terkait produk/layanan keuangan khususnya yang sesuai bagi mahasiswa maupun akademisi seperti tabungan *SiMuda*, reksa dana mikro, nabung saham, asuransi mikro, pembiayaan





kendaraan bermotor roda dua, dan produk/layanan keuangan lainnya.

Dady Mairuhu, Direktur Politeknik Negeri Ambon menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan OJK menetapkan Politeknik Negeri Ambon sebagai tuan rumah diselenggarakannya kegiatan kuliah umum Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen sebagai rangkaian kegiatan OJK Goes to Campus dan Edu Expo.

“Materi literasi dan edukasi keuangan yang diterima oleh para mahasiswa dan akademisi yang hadir

akan sangat bermanfaat sekali karena aktivitas manusia tidak terlepas dari peranan lembaga jasa keuangan,” ujarnya. Sehubungan dengan kegiatan tersebut diselenggarakan bertepatan dengan hari pertama perkuliahan, lanjutnya, maka diharapkan para mahasiswa dapat menerima materi dengan baik sebagai salah satu nilai tambah perkuliahan.

Syarief Hadler selaku Wakil Walikota Ambon turut hadir menyampaikan sambutan dan membuka rangkaian kegiatan tersebut mewakili Walikota Ambon yang berhalangan hadir. “Kegiatan yang



diselenggarakan OJK bagi mahasiswa dan dosen serta civitas akademika lainnya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kota Ambon sejalan dengan program prioritas Pemerintah Kota Ambon, yaitu Ambon Berkualitas,” tuturnya.

Menurut dia, masyarakat Kota Ambon terus didorong untuk menjadi masyarakat yang cerdas, berkualitas, bermoral dan berbudaya melalui berbagai upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas, baik secara formal maupun non formal dalam mewujudkan cita-cita Ambon yang harmonis, sejahtera dan religius.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen menyampaikan kuliah umum mengenai peran sektor jasa keuangan dalam perekonomian. Secara umum materi yang disampaikan meliputi pengenalan tugas, fungsi, dan latar belakang berdirinya OJK, peluang dan tantangan perekonomian Indonesia, kontribusi sektor jasa keuangan dalam pembangunan, serta kontribusi sektor jasa keuangan dalam pengentasan kemiskinan.

Tren peningkatan perekonomian Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang *solid*, hal itu mendapatkan pengakuan dunia internasional mulai dari Indonesia telah memperoleh status *investment grade* dari lembaga pemeringkat, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia yang membaik, peningkatan peringkat daya saing global, serta ditetapkannya Indonesia menjadi negara tujuan investasi.

Indonesia dengan potensi luar biasa saat ini belum mampu menghasilkan produk-produk dengan daya saing yang cukup baik di pasar internasional, oleh karena itu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia yaitu mengejar infrastruktur, peningkatan kesejahteraan dan penurunan ketimpangan masyarakat, serta perkembangan inovasi digital yang tidak terbendung. ●



OJK Gencarkan Edukasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Investor Saham Pemula

Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar *Goes to Campus* dan Edu Expo di Universitas Muhammadiyah Makassar, serta Edukasi Komunitas bagi karyawan dan profesional pada Kamis, 28 Maret 2019, yang semula akan dilaksanakan di Universitas Hasanuddin.

Kuliah umum Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK menjadi acara utama yang diikuti oleh 1.115 orang peserta dengan latar belakang mahasiswa, akademisi dan dosen yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar.

Turut hadir juga Walikota Makassar Danny Pomanto, Dwi Retno Nurotul Wahidiyah selaku *First Senior Manager* Bank Mandiri, Cindy Vannie Arie selaku *Senior Manager Ritel Payment & Card* Bank BRI, Pemimpin BNI Kantor Kas Sultan Hasanuddin M. Faqih Rizal, Sefudin Suria Hidayat selaku *Branch Manager* BSM Makassar, Pemimpin





Bursa Efek Indonesia Wilayah Makassar Fahmin Abdullah, Alim Sutiono selaku pemimpin Wilayah VI Makassar PT Pegadaian dan beberapa CEO dari perusahaan *fintech*.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, terdapat pameran produk/layanan keuangan sebagai partisipasi dari 12 lembaga jasa keuangan di wilayah Makassar yang dikhususkan bagi mahasiswa maupun akademisi serta *booth* perwakilan dari OJK.

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Zulmi selaku Kepala OJK Regional 6, Sulawesi, Maluku, dan Papua, kemudian Muhammad Tahir, Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), dan Walikota Makassar Bapak Ramdhan Pomanto.

Kuliah umum oleh Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK mengenai peran sektor jasa keuangan dalam perekonomian. Sesi *talkshow* terbagi menjadi tiga, yakni Sesi I *talkshow* mengenai “Bijak Berinvestasi Bagi Generasi Muda di Era Ekonomi Digital Melalui *Fintech*” dengan pembicara Hendrikus Passagi, Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Fintech* OJK, CEO Tokomodan Chris Antonius, dan CEO Berdayakan Usaha Indonesia (Batumbu) Sonny Joseph.

Acara dilanjutkan dengan Sesi II *talkshow* mengenai “Pengenalan Produk Simpanan Pemuda dan



Mahasiswa (SiMuda)”. Pembicaraannya antara lain Edwin Nurhadi selaku Deputy Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, *First Senior Manager* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dwi Retno Nurotul Wahidiyah, *Senior Manager Ritel Payment & Card* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cindy Vannie Arie, M. Faqih Rizal selaku Pemimpin Kantor Kas Sultan Hasanuddin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., serta Sefudin Suria Hidayat, *Branch Manager Makassar* PT Bank Syariah Mandiri.

Pada Sesi III *talkshow* mengenai “Pilihan Instrumen Investasi Bagi Generasi Muda” dengan pembicara Fahmin Abdullah selaku Kepala Perwakilan Sulawesi Selatan PT Bursa Efek Indonesia, Kasubdit Analisis Keuangan dan Pasar SBSN Kementerian Keuangan Riestianti, dan Alim Sutiono selaku Pemimpin Wilayah VI Makassar PT Pegadaian.

Sebagai bentuk evaluasi terhadap tingkat pemahaman para peserta, kami menggunakan kuesioner *pre-test* dan *post-test* elektronik (*Google Forms*) yang terdiri dari 12 pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh narasumber pada

kuliah umum dan *talkshow* kepada 1.115 mahasiswa.

Sementara itu, OJK juga melakukan edukasi keuangan bagi komunitas investor saham pemula yang dihadiri oleh sebanyak 98 peserta dari segmen pelajar, mahasiswa, karyawan dan pengusaha muda pada Selasa, 30 Maret 2019 di Hotel Aston Makassar.

Acara tersebut diawali dengan sambutan pembukaan oleh Andri Arfan selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal OJK Regional 6 mewakili Kepala Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua OJK.

Peserta edukasi keuangan menerima materi pengenalan OJK, perencanaan keuangan dan produk/layanan jasa keuangan dari para narasumber, yaitu tentang pengenalan pasar modal oleh Fahmin Amirullah, Kepala Perwakilan Sulawesi Selatan PT Bursa Efek Indonesia, Perencanaan Keuangan dan Pengenalan Reksa Dana oleh Ryan Filbert, tentang Investasi alternatif dengan Teknologi Finansial (*Fintech*) oleh Nikki Hartanto, dan Optimalisasi Investasi Reksa Dana dan rekap materi Reksa Dana oleh Ryan Filbert. ●



Untuk Menyejahterakan, Bukan Menyusahkan

Ekosistem layanan keuangan berbasis teknologi informasi atau *financial technology* (*fintech*) terus berkembang belakangan ini. Sejumlah pemain baru di industri *fintech* juga terus bermunculan menyemarakan pasar.

Ketergantungan masyarakat terhadap sejumlah aplikasi layanan keuangan berbasis teknologi juga semakin tinggi. Paling gampang terlihat, masyarakat saat ini lebih suka menggunakan layanan bank *mobile* melalui perangkat selulernya.

Tanpa perlu harus antre ke bank, layanan transaksi sudah bisa dilakukan, bahkan ketika sedang berada di perjalanan. Semuanya sekarang serba mudah dan cepat.

Contoh aplikasi layanan keuangan berbasis IT adalah penggunaan aplikasi antar jemput penumpang atau makanan melalui jasa *online*. Masyarakat semakin sering mengisi saldo di aplikasi yang

disediakan, daripada membayar secara tunai.

Perkembangan lainnya yakni layanan pinjam meminjam uang yang berbasis IT. Layanan model itu pun sekarang juga semakin beragam.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis IT atau *peer to peer lending* itu memang membantu kelompok masyarakat untuk mengakases keuangan dengan cepat.

Hanya saja, masyarakat acap kali lebih mementingkan kemudahan yang ditawarkan ketimbang risiko yang dihadapi saat meminjam dana secara *online*.

Oleh sebab itu, masyarakat harus mencermati layanan keuangan berbasis IT yang memiliki izin resmi.

Sebagai gambaran, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Februari 2019 mencatat ada sekitar 231 *fintech* ilegal.

Adanya *fintech* ilegal harus disadari masyarakat. Oleh sebab itu,

saat hendak melakukan transaksi dengan *fintech*, yakinkan bahwa *fintech* yang melayani terdaftar di OJK.

Dengan terdaftar di OJK, biasanya perjanjian pinjaman dan jangka waktunya disesuaikan dengan regulasi oleh otoritas.

Kemudian, masyarakat harus memahami haknya sebagai konsumen. Hak bukan sekadar memperoleh dana yang dipinjam, melainkan juga bagaimana saat terjadi potensi gagal bayar dan proses penyelesaiannya.

Oleh sebab itu, masyarakat yang ingin mengakses pinjaman secara *online* harus mengetahui prosedur dan informasi mengenai layanan yang akan diaksesnya itu.

Harus diingat, layanan keuangan tujuannya adalah membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan, bukan justru membuat masyarakat terjebak dalam kesusahan. ●

SiMUDA

yang Muda yang Berencana

"Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) adalah (program) tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia"



SiMuda RumahKu

tabungan rencana untuk mengangsur uang muka KPR (DP KPR) dan dilindungi dengan proteksi asuransi.



SiMuda InvestasiKu

tabungan rencana yang memiliki fitur berinvestasi di reksa dana secara berkala dan dilindungi dengan proteksi asuransi.



SiMuda EmasKu

pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah (jual beli) dan dilindungi dengan proteksi asuransi.





INKLUSI KEUANGAN

untuk semua

